

**EVALUASI PERUBAHAN
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
MENJADI KANTOR KELUARGA BERENCANA
DI KABUPATEN KLATEN**



Skripsi

Disusun Oleh:

SEPTIAN EKO RADHIANTO

D 0103112

Disusun Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2010

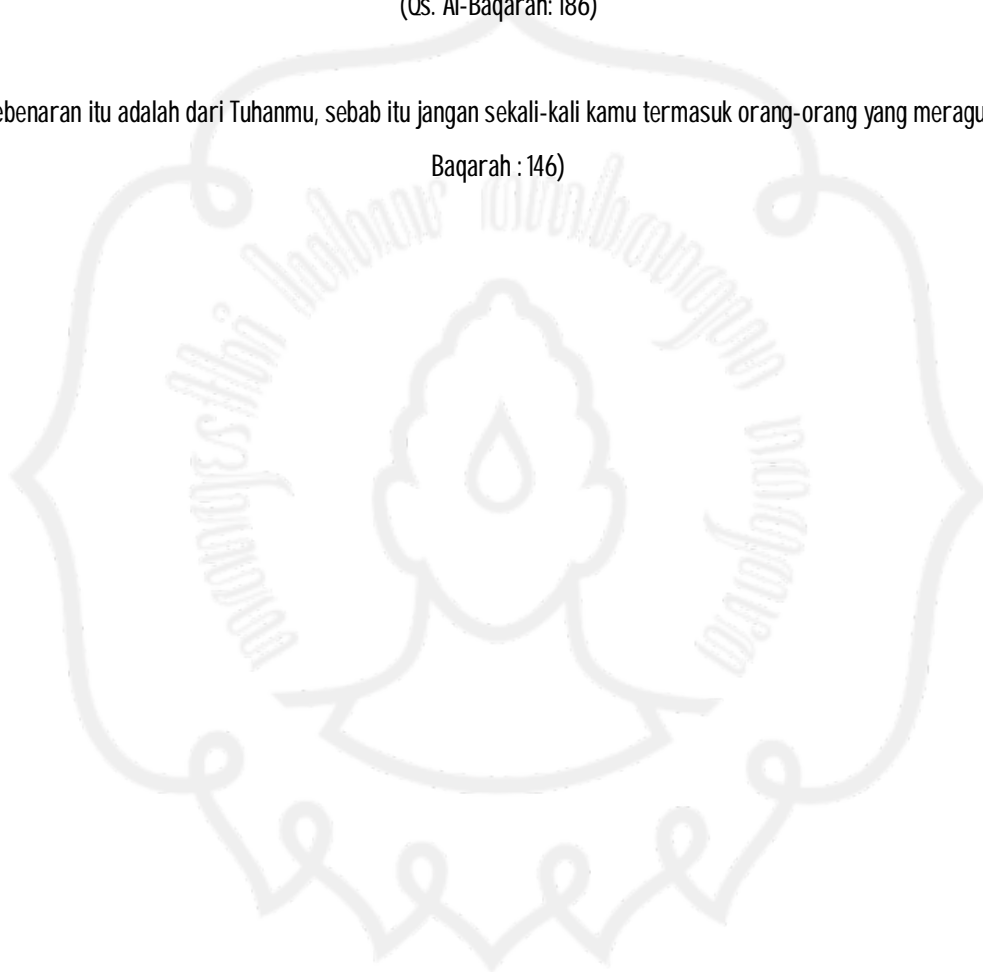
MOTTO

“Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang AKU, maka jawablah bahwasanya AKU adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia memohon kepadaKU , maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahKU dan hendaknya mereka beriman kepadaKU agar mereka selalu berada dalam kebenaran ”

(Qs. Al-Baqarah: 186)

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang meragu.”(Al

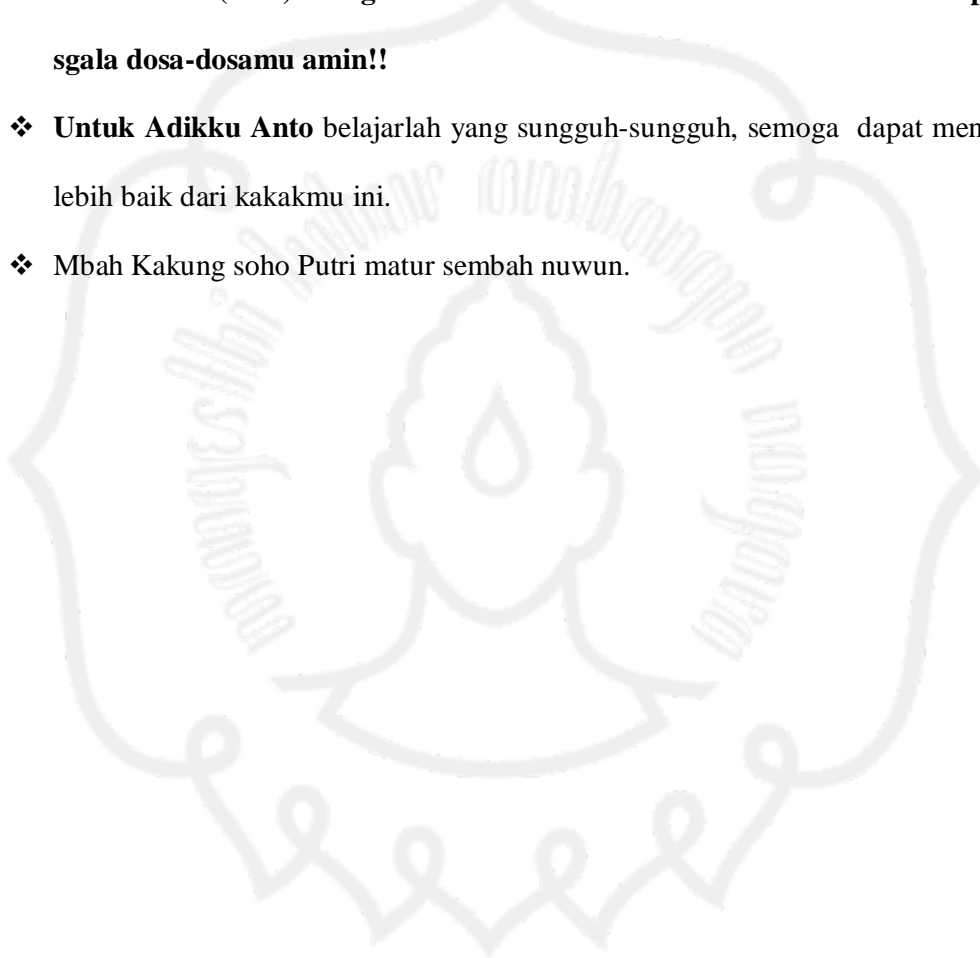
Baqarah : 146)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh hormat skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ **Umiku** yang selalu mencurahkan kasih sayangnya sepanjang hidupku.
- ❖ **Abiku** semoga lekas sembuh.
- ❖ Adiku **Adhit (Alm)** smoga amal ibadahmu diterima alloh swt dan diampuni sgala dosa-dosamu amin!!
- ❖ **Untuk Adikku Anto** belajarlh yang sungguh-sungguh, smoga dapat menjadi lebih baik dari kakakmu ini.
- ❖ Mbah Kakung soho Putri matur sembah nuwun.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Evaluasi Dampak Perubahan BKKBN Menjadi KKB di Kabupaten Klaten**”. Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan khusus kepada:

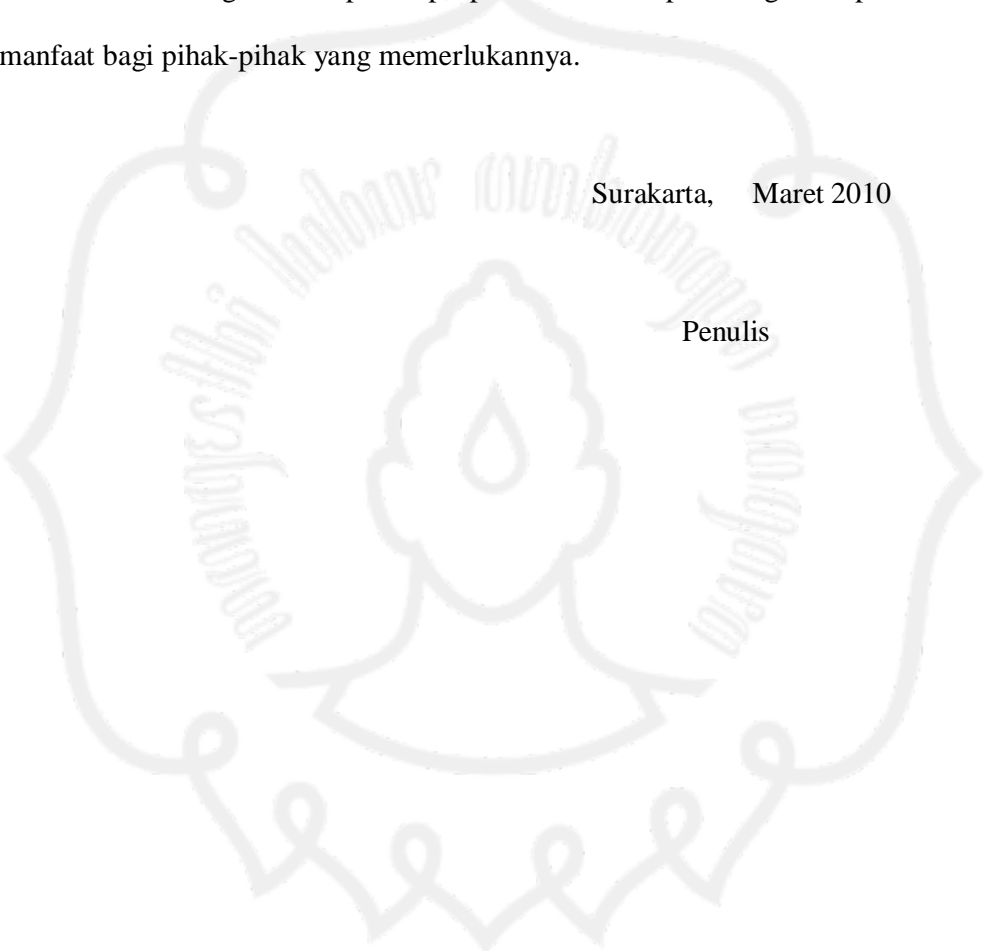
1. Bapak Drs. H. Sakur, SU, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pencerahan dan arahan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Retno, selaku pembimbing penulis di lapangan yang telah membimbing penulis selama pencarian data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Drs. Sudarto, M.Si, sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNS.
4. Drs. H. Supriyadi SN., SU, selaku Dekan FISIP UNS.
5. Dosen-dosen jurusan Ilmu Administrasi.
6. Seluruh Pegawai Kantor KKB yang telah berkenan memberikan informasi.
7. Ibu yang selalu mendampingi dan memotivasi sekaligus memarahiku juga berjuang bersamaku untuk menyelesaikan skripsiku.
8. Seluruh Mahasiswa AN angkatan '03, mari kita bangun jaringan setelah lulus

9. Semua rekan-rekan kampus makasih atas pemberian semangat dan bantuannya.

Semoga segala budi baik dan keiklasan atas bantuan yang diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Sebagai kata penutup, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Surakarta, Maret 2010

Penulis



HALAMAN PENGESAHAN

Telah Diuji dan Disahkan oleh Panitia Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Pada Hari :

Tanggal :

Panitia Penguji :

Ketua : **Drs. H. Susartono, SU.** ()
NIP. 19460714 197903 1 001

Sekretaris : **Dra. Sudaryanti, M.Si** ()
NIP. 19570426 198601 2 002

Penguji : **Drs. H. Sakur, MS** ()
NIP : 19490205 198012 1 001

Mengetahui,

Dekan

FISIP UNS

Drs. H Supriyadi, SN, SU.

NIP. 195301281981031001

PERSETUJUAN

Disetujui Untuk Dipertahankan di Hadapan Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pembimbing Skripsi

Drs. H. Sakur, MS
NIP : 19490205 198012 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	

A. Latar Balakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Organisasi.....	9
2. Perubahan Organisasi.....	13
3. Evaluasi dan Kebijakan.....	17
E. Kerangka Pemikiran.....	26
F. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Lokasi Penelitian.....	29
3. Sumber Data.....	30
4. Teknik Pengumpulan Data.....	31
5. Teknik Pengambilan Sampel.....	32
6. Validitas Data.....	35
7. Teknik Analisis Data.....	36
 BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Letak dan Data Geografis Kabupaten Klaten.....	37
B. Sejarah BKKBN di Kabupaten Klaten.....	38
C. Gambaran umum Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Klaten..	65
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
D. Perubahan – perubahan dari BKKBN menjadi KKB Kabupaten Klaten.....	75
1. Perubahan Bentuk Organisasi.....	76
2. Perubahan Pembiayaan/Pendanaan Operasional Organisasi.....	78
3. Pengorganisasian.....	80
4. Kepegawaian.....	82
5. Hasil Program.....	83

E. Evaluasi dampak perubahan dari BKKBN menjadi KKB Kabupaten Klaten.....	84
F. Kendala yang dihadapi dalam menjalankan roda organisasi BKKBN setelah menjadi KKB.	91
BAB IV PENUTUP	
G. Kesimpulan.....	95
H. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	100

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Distribusi Penduduk menurut Pulau, 1930-2005 <i>Distribution of Population by Island, 1930-2005</i>	1
Tabel 1.2 Kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik.....	23
Tabel 2.1 Banyaknya klinik KB dan Petugas KB menurut kategori petugas.....	74
Tabel 3.1 Matrik Perubahan Organisasi BKKBN menjadi KKB di Kabupaten Klaten.....	94



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Skema kerangka pemikiran.....	28
Gambar 1.2	Model Analisis Interaktif	36
Gambar 2.1	Bagan Organisasi Kantor Keluarga Berencana Kabupaten klaten.....	67
Gambar 3.1	Struktur organisasi BKKBN Kab. Klaten.....	85
Gambar 3.2.	Bagan struktur organisasi BKKBN setelah berubah menjadi KKB.....	86

Abstrak

SEPTIAN EKO RADHIANTO. D0103112. Evaluasi Perubahan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Kantor Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten. Skripsi Program Studi Administrasi Negara. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2010. 102 Halaman.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui perubahan yang terjadi setelah BKKBN Kabupaten Klaten menjadi KKB Kabupaten Klaten. Secara spesifik untuk mengetahui bentuk organisasi, pendanaan (sumber dan alokasi), kepegawaian, program dan pelaksanaan program di kantor KB setelah perubahan terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif yang di laksanakan di Kantor KB Kabupaten Klaten. Dengan teknik sampling bertujuan (*purposif sampling*), penulis mengumpulkan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam hal uji validitas data penulis menggunakan teknik triangulasi data sehingga informasi dari nara sumber yang satu bisa dibandingkan dengan informasi dari nara sumber yang lain. Sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif.

Dari Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Perubahan Organisasi KB di Kabupaten Klaten dari semula yang berbentuk BKKBN dan berubah menjadi KKB menimbulkan dampak yang besar pada beberapa sektor. Pertama dari segi keorganisasian, kantor KB mengalami perubahan yang sangat mendasar yang dapat dilihat dari adanya perubahan struktur dan perampingan bentuk organisasi. Perubahan ini mengakibatkan adanya penumpukan tugas pokok dan fungsi masing masing bagian. Kedua, dari segi pendanaan, kantor KB mengalami perubahan yang mana semula pendanaan ditopang oleh APBN dan APBD dengan porsi APBN yang lebih besar dan merupakan sumber utama untuk mencukupi kebutuhan program, tetapi sekarang dibalik posisinya. APBD menjadi sumber utama dan APBN hanya bersifat talangan saja yang semakin ke depan semakin dikurangi jumlahnya sehingga banyak sekali program KB yang dananya kurang karena porsi APBD yang dianggarkan untuk kegiatan KB masih sangat kecil dan tidak mencukupi untuk mengkover semua kegiatan/program KB akibatnya beberapa ditiadakan dan beberapa program tidak jalan. Ketiga, dari segi kepegawaian. Perubahan struktur kepegawaian Organisasi KB terlihat dari adanya reposisi pegawai dimana petugas KB yang ada di kecamatan-kecamatan dan desa-desa

Provinsi Province	Penduduk (Juta) / Population (Million)								
	1930	1961	1971	1980	1985	1990	1995	2000	2005
1. Jawa dan Madura	41.7	63.0	76.1	91.3	99.9	107.6	114.7	121.3	128.5
2. Sumatera	8.2	15.7	20.8	28.0	32.6	36.5	40.8	42.5	46.0
3. Kalimantan	2.2	4.1	5.2	6.7	7.7	9.1	10.5	11.3	12.1
4. Sulawesi	4.2	7.1	8.5	10.4	11.6	12.5	13.7	14.9	15.8
5. Pulau lainnya	4.6	7.1	8.6	11.1	12.3	13.7	15.0	15.1	16.5
6. Total	60.9	97.0	119.2	147.5	164.1	179.4	194.8	205.1	218.9

Sumber/Source: BPS, berbagai publikasi

Pada kisaran tahun 1930 sampai dengan tahun 1961 terjadi pertambahan penduduk yang cukup besar yang terjadi di semua pulau di Indonesia, dari yang semula pada tahun 1930 berjumlah ± 60,9 juta jiwa menjadi ± 97,0 juta jiwa dengan jumlah penduduk terbesar di pulau Jawa. Hal ini memerlukan tidak lanjut yang serius, karena apabila tidak Indonesia akan mengalami ledakan penduduk yang dapat berimbas kepada tidak stabilnya pembangunan. Kemudian sebuah kebijakan yang mengatur masalah kependudukan (pengendalian jumlah kelahiran) pun muncul melalui Program Keluarga Berencana yang biasa disebut dengan Program KB. Pada awal periode tahun 1971-1980 Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mencapai sekitar 2,32% pertahun. Dari yang semula penduduk Indonesia berjumlah 118.367.850 jiwa pada tahun 1971 berkembang menjadi 146.776.473 jiwa (www.bps.go.id). Pertumbuhan penduduk yang pesat ini memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah.

Secara resmi Program KB ini dilaksanakan sejak tahun 1970 dengan di terbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 1970, maka di bentuklah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang di singkat dengan nama BKKBN. Seiring dengan adanya penerbitan Keppres RI No. 8 Tahun 1970

maka BKKBN bertugas mengelola dan melaksanakan Program Keluarga Berencana. Oleh karena adanya kebijakan tersebut, maka tiap daerah memiliki BKKBN termasuk Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dan Kabupaten Klaten termasuk di dalamnya.

Pada awal mula pelaksanaan Program KB di Kabupaten Klaten(tahun 1970), pelaksanaannya masih menjadi satu dengan program-program kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, dan pada waktu itu Program KB masuk dalam program dari seksi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Pada waktu itu Kantor BKKBN berkedudukan di RSPD Klaten. Kemudian keberadaan BKKBN dipertegas dengan adanya Keppres No. 33 Tahun 1972, yang menyatakan bahwa status BKKBN dipertegas menjadi Lembaga pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden yang kemudian di pertegas lagi dengan adanya Keppres No. 38 Tahun 1978, dimana terdapat tambahan program baru yakni Kependudukan.

Adapun visi dan misi yang ingin dicapai BKKBN pada masa awal pembentukannya adalah sebagai berikut:

a. Visi

“ Norma Keluarga Kecil yang bahagia dan sejahtera” yang disingkat dengan nama NKKBS

b. Misi

- 1) Memperluas pelaksanaan program KB seluruh pedesaan.
- 2) Mengidentifikasi dan menumbuhkan partisipasi kelembagaan, unsure-unsur masyarakat dan individu-individu di dalam masyarakat agar berperan aktif dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan program di lingkungannya.

- 3) Meningkatkan peran serta lembaga pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat dalam pelebagaan dan pembudayaan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Visi dan Misi merupakan pondasi untuk terbentuknya suatu organisasi yang mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan merupakan komponen utama pembentukan suatu organisasi. Dengan adanya visi dan misi maka diharapkan organisasi dapat mencapai tujuannya dan tidak melenceng dari tujuan awal dibentuknya organisasi tersebut. Realisasi visi dan misi program KB di Kabupaten Klaten dituangkan dalam beberapa program inti seperti pelayanan terhadap akseptor KB, program keluarga kecil sejahtera dan penyuluhan mengenai arti penting KB pada masyarakat.

Adapun pelaksanaan program KB di Kabupaten Klaten yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 1970-1980 pendekatannya dilakukan dalam tiga dimensi, yaitu :

- a. Perluasan jangkauan

Meliputi usaha mengajak peserta KB baru serta institusi-institusi baru yang kemudian diharapkan dapat membantu mengelola program kependudukan dan keluarga berencana.

- b. Pembinaan

Meliputi usaha memantapkan penerimaan gagasan keluarga secara lestari, tidak dalam keikutsertaan sebagai peserta KB maupun dalam kelanjutan pengelolaan program.

- c. Pelebagaan dan pembudayaan

Meliputi usaha meningkatkan diterimanya NKKBS dalam hal ini termasuk pula usaha meningkatkan peranan pengarapan program KB secara efektif dan mantap.

Secara umum kebijakan Program KB adalah mewujudkan keluarga kecil dengan catur warga yang bahagia dan sejahtera serta mendorong seluruh sektor pembangunan untuk menjadikan penduduk sebagai factor penunjang pembangunan dan diarahkan untuk mempercepat penerimaan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera sebagai cara hidup yang layak dan bertanggung jawab, serta mendorong dan menjadikan program KB sebagai gerakan masyarakat.

Pada periode tahun 1991-2000 misi BKKBN mulai lebih spesifik dengan meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam program :

- 1) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
- 2) Pengaturan kelahiran
- 3) Pembinaan ketahanan keluarga
- 4) Peningkatan kesejahteraan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Penorganisasian pada periode 1991-2000 lebih spesifik dan detail, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera serta Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1993, maka terbit Struktur Organisasi yang baru, sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 111/HK.010/C4/94 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Dalam Bab IV pasal 102 disebutkan bahwa BKKBN

kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Kantor BKKBN kabupaten yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor BKKBN Povinsi sesuai dengan pasal 105, Organisasi Kantor BKKBN Kabupaten Klaten termasuk kabupaten tipe A. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

- a) Kepala kantor
- b) Sub Bagian Tata Usaha
- c) Seksi penyusunan dan perencanaan program
- d) Seksi keluarga berencana
- e) Seksi keluarga sejahtera
- f) Sub Bagian supervise
- g) Pengawas PLKB dan PLKB.

Dengan berakhirnya Pemerintahan Orde Baru dan mulai berdirinya Orde Reformasi banyak hal yang terjadi di Indonesia, banyak kebijakan-kebijakan baru yang dibuat. Kemudian tak lama pada tahun 1999 munculah undang-undang baru yang menjadi tonggak sejarah baru di Indonesia dengan lahirnya Undang-undang mengenai Otonomi Daerah yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Karakteristik pemerintahan yang semula bersifat sentralistik lambat tapi pasti sudah mulai berubah menjadi desentralisasi yang lebih terbuka dan memungkinkan tiap-tiap daerah untuk dapat mengatur dan mengelola daerahnya sendiri secara lebih optimal menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Dengan Otonomi Daerah ini tiap-tiap daerah di Indonesia mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk dapat mengelola daerahnya masing-masing. Sebagai imbasnya tiap-tiap daerah harus mulai mandiri dan mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Termasuk diantaranya adalah mulai di serahkannya kewajiban dan hak untuk mengelola organisasi dan institusi pemerintahan di daerah

masing-masing termasuk juga dalam pengelolaan BKKBN di tiap daerah dan hal ini berlaku juga di Kabupaten Klaten.

Penyerahan kewenangan BKKBN ke daerah ditandai dengan adanya Keputusan Presiden Nomor : 103 Tahun 2001, dimana BKKBN merupakan salah satu instansi pemerintah yang harus diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Penyerahan kewenangan tersebut dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 dengan pertimbangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tiap-tiap daerah. Akan tetapi dengan adanya otonomi daerah keberlangsungan BKKBN akan tergantung oleh pemerintah daerah apakah tetap menggunakan BKKBN ataukah meniadakannya.

Khusus di Kabupaten Klaten, keberadaan instansi yang memantau dan mengatur kependudukan (BKKBN) dianggap masih sangat diperlukan karena dianggap berhasil dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klaten. Oleh karena itu keberadaan BKKBN dipertahankan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Akan tetapi bentuk instansinya (organisasi) tidak lagi berupa BKKBN Kabupaten Klaten akan tetapi berubah menjadi Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Klaten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2003 yang tertanggal 20 November 2003 yang menyebutkan tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten. Dengan adanya Perda tersebut maka yang semula BKKBN Kabupaten Klaten berubah menjadi Kantor Keluarga Berencana (KKB) Kabupaten Klaten. Adapun struktur organisasi dari KKB Kabupaten Klaten, adalah sebagai berikut :

- a) Kepala kantor
- b) Sub Bagian Tata Usaha
- c) Seksi Pendataan
- d) Seksi Pelayanan
- e) Seksi evaluasi dan Pelaporan
- f) Kelompok jabatan fungsional.

Organisasi yang semula berupa BKKBN Kabupaten Klaten berubah menjadi KKB Kabupaten Klaten salah satu perubahan yang terjadi adalah mengenai perubahan struktur organisasi seperti yang diuraikan secara singkat diatas. Tentu dengan adanya perubahan dari BKKBN menjadi KKB akan menimbulkan suatu dampak pada Organisasi keluarga berencana ini. Atas dasar uraian dalam latar belakang masalah yang telah dikemukakan di depan, maka penelitian ini akan menggali hal yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan BKKBN menjadi KKB di Kabupaten Klaten dalam lingkup internal organisasi.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana perubahan BKKBN menjadi KKB di Kabupaten Klaten, dilihat dari internal organisasi keluarga berencana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi setelah BKKBN Kabupaten Klaten menjadi KKB Kabupaten Klaten.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, akan menggunakan teori yang dapat mendukung penelitian dan membantu merumuskan kerangka pemikiran.

1. Organisasi

Organisasi merupakan kesatuan sosial yang di koordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan (dalam Jusuf Udaya oleh Robbins, 1994 : 4)

Definisi mengenai organisasi mengakui adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggota interaksi secara formal oleh karena itulah terbentuk struktur organisasi. Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti (dalam Jusuf Udaya oleh Robbins, 1994 : 6)

Menurut Hammer, organisasi abad ke-21 karakteristiknya adalah pertanggungjawaban, otonomi, penuh resiko dan ketidakpastian; suatu organisasi yang harus mampu hidup dalam dunia penuh tantangan, aspiratif, penuh perbedaan dalam banyak hal (dalam Amin Ibrahim, 2008 ; 91).

Menurut Stephen P. Robbin(dalam Jusuf Udaya, 1994 : 6), organisasi dikonsepsikan dengan berbagai cara dan beberapa diantaranya :

1. Kesatuan rasional dalam menggelar tujuan. Organisasi ada untuk mencapai tujuan, dan perilaku para anggota organisasi dapat dijelaskan sebagai pengejaran rasional dalam pengejaran tersebut.
2. Koalisi dan pendukung yang kuat (*constituencies*) yang kuat. Organisasi terdiri dari kelompok-kelompok yang masing-masing mencoba untuk memuaskan kepentingan sendiri. Kelompok-kelompok tersebut menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi distribusi sumber daya dalam organisasi.
3. Sistem terbuka. Organisasi adalah sistem transformasi masukan dan keluaran yang bergantung pada lingkungan untuk kelangsungan hidupnya.
4. Sistem yang memproduksi arti. Organisasi adalah kesatuan yang diciptakan secara artifisial. Tujuan dan maksudnya diciptakan secara simbolis dan dipertahankan oleh manajemen.
5. Sistem yang digabungkan secara longgar. Organisasi itu terdiri dari unit-unit yang relatif berdiri sendiri dapat mengerjakan tujuan yang tidak sama atau bahkan saling bertentangan.
6. Sistem politik. Organisasi terdiri dari pendukung internal yang mencoba memperoleh kontrol dalam proses pengambilan keputusan agar dapat memperbaiki posisi mereka.
7. Alat dominasi. Organisasi menempatkan para anggotanya ke dalam “kotak-kotak” pekerjaan yang menghambat apa yang dapat mereka lakukan dan individu yang dengannya mereka dapat berinteraksi. Selain itu mereka diberi atasan yang mempunyai kekuasaan terhadap mereka.
8. Unit pemrosesan informasi. Organisasi menafsirkan lingkungannya, mengkoordinasikan aktivitas, dan memudahkan pembuatan keputusan dengan memproses informasi secara horisontal dan vertikal melalui sebuah struktur hierarki.
9. Penjara psikis. Organisasi menghambat para anggota dengan membuat uraian pekerjaan, departemen, divisi, dan perilaku standar yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Pada saat diterima oleh anggota, semua itu menjadi penghalang artifisial yang membatasi pilihan.
10. Kontrak sosial. Organisasi terdiri dari sejumlah persetujuan yang tidak tertulis dimana para anggota melakukan perilaku tertentu dan untuk itu mereka menerima imbalan.

Menurut Mintzberg (dalam Jusuf Udaya oleh Robbins, 1994 : 304)

menyatakan bahwa setiap organisasi mempunyai lima bagian dasar, antara lain :

1. *The operating core*. Para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produksi dan jasa.
2. *The strategic apex*. Manajer tingkat pucak, yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi itu.
3. *The middle line*. Para manajer yang menjadi para penghubung *operating core* dan *strategic apex*

4. *The technostructure*. Para analis yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi.
5. *The support staf*. Orang-orang yang mengisi unit staf, yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi.

Kemudian menurut Gibson (dalam Winardi, 2003 : 13) berpendapat bahwa organisasi-organisasi merupakan entitas-entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil-hasil tertentu, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara sendiri. Organisasi-organisasi dicirikan oleh perilaku mereka yang mengarah ke arah pencapaian tujuan.

Perlu diingat (menurut L.F. Urwick dalam Winardi, 2003 : 13) bahwa organisasi-organisasi lebih dari hanya alat untuk menciptakan barang-barang dan menyelenggarakan jasa-jasa. Organisasi-organisasi menciptakan kerangka(*setting*), di mana banyak diantara kita melaksanakan proses kehidupan. Sehubungan dengan itu dapat kita katakan bahwa organisasi-organisasi menimbulkan pengaruh besar atas perilaku kita.

Menurut Jorgenson, Hansen, Antonsen dan Melansen 1998:499 dalam tulisannya mengemukakan bahwa birokrasi berpengaruh besar pada organisasi public.

The public sector has in this century developed a vast heterogeneity of functions, organizational forms and modes of governance (Kooiman 1993). The traditional bureaucratic state relying on hierarchy, rules and universalism has been challenged by the growth of the welfare state expanding a number of professional fields such as health, education, social services, public libraries, and environmental protection.

Herbert G. Hicks (dalam Winardi, 2003: 15) menyajikan rumusan berikut untuk sebuah organisasi:

“....An organization is a structured process in which persons interact for objectives”

Adapun definisi tersebut berlandaskan sejumlah fakta yang merupakan ciri umum organisasi :

1. Sebuah organisasi senantiasa mencakup sejumlah orang.
2. Orang-orang tersebut terlibat satu sama lain dengan satu atau lain cara (berinteraksi).
3. Interaksi tersebut selalu dapat diatur atau diterangkan dengan jenis struktur tertentu.
4. Masing-masing orang di dalam suatu organisasi memiliki sasaran-sasaran pribadi, di mana beberapa di antaranya merupakan alasan bagi tindakan-tindakan yang dilakukannya di dalam organisasi tersebut akan membantunya mencapai sasaran-sasarannya.

Winardi mendefinisikan sebuah organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, di antara mana subsistem manusia yang mungkin merupakan subsistem yang terpenting, dan dimana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan.

2. Perubahan organisasi

Bagaimana perubahan itu bisa terjadi dalam organisasi? Perubahan dapat terjadi, mungkin disebabkan adanya identifikasi peluang yang akan dimanfaatkan manajemen. Namun lebih sering itu berupa antisipasi dari atau reaksi atas suatu masalah. Peluang dan masalah tersebut bisa ada dalam organisasi tersebut, diluar

organisasi, atau diluar dan didalam organisasi tersebut.(pendapat robbins dalam Jusuf Udayana, 1994 ; 420).

Menurut Robbins ada beberapa determinan perubahan structural, antara lain ;

1. Perubahan tujuan
2. Implementasi suatu sistem pemrosesan informasi yang canggih.
3. Peraturan pemerintah
4. Ekonomi.
5. Penggabungan atau akuisisi.

Menurut Conger (dalam Amin Ibrahim, 2008 ; 91) memberikan teori bahwa berubahnya suatu generasi dan manajemen maka akan berubah pula tututan akan organisasi. Sedangkan Drucker (dalam Amin Ibrahim, 2008 ; 91) berpendapat bahwa, manajemen ditengah perubahan besar karenanya prinsip-prinsip organisasi pun akan berubah.

Adapun menurut Kanter (dalam Amin Ibrahim, 2008 ; 92) ada beberapa “pergeseran” yang penting bagi suatu organisasi kedepannya antara lain :

1. Dari “ gemuk” ke ramping.
2. Dari vertikal ke horisotal.
3. homogenitas ke heterogenitas.
4. Dari status dan komando ke profesionalisme dan hubungan baik.
5. Dari “usaha besar” ke proyek-proyek dengan loyalitas dinamis dan terbagi-bagi.
6. Dari bertumpu pada struktur ke reputasi pentingnya aset.
7. Ada alat yang jelas untuk meningkatkan gairah dan motivasi, yakni misi, pembelajaran, reputasi, kretivitas, evaluasi *human capital* , kontrak sosial yang selalu diperbaharui.

Sedangkan Gadiesh dan Oliver berpendapat bahwa, organisasi masa depan memerlukan restrukturisasi terhadap kekeliruan selama ini, yang bersifat *top*

down. Hubungan vertikal bukanlah proses pengambilan keputusan, tugas (*job*) bukan tim, struktur bukannya dukungan. Struktur organisasi kedepan haruslah organisasi yang fleksibel terhadap *redesign*, mampu beradaptasi, dan berubah karena kesepakatan bersama (dalam Amin Ibrahim, 2008 ; 92).

Menurut Morten Edenberg (1999:158) beliau menegaskan bahwa organisasi berubah sesuai dengan spesialisasi bagian-bagiannya. Proses spesialisasi mengacu pada orang, grup atau organisasi.

Process-specialized organizations on the other hand tend to cultivate professional knowledge and how things are done rather than what is done. Specializing according to the clientele principle is assumed to foster a 'holistic' view on a person, group or organization, contrary to what can be expected from a purpose-based bureaucracy (which on the other hand scores high on sectoral standardization and knowledge).

Menurut Bennis (dalam Winardi, 2003 : 194) perkembangan (perubahan) organisasi juga memiliki ciri-ciri dasar khusus dan termasuk di dalamnya :

1. sebuah strategi edukasional,
2. sebuah hubungan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan khusus akan perubahan;
3. ditekankannya perilaku yang berpengalaman,
4. digunakannya agen-agen perubahan (eksternal)
5. kebutuhan akan hubungan-hubungan kolaboratif;
6. sebuah falsafah sosial; sekelompok tujuan-tujuan normatif.

Menurut Neldler dan Tushman (dalam Winardi, 2003 : 198) perubahan keorganisasian terdapat empat macam tipe, yakni tipe ;

1. Perbaikan terus-menerus (*tuning*). Ini merupakan perubahan yang beresiko paling kecil, yang bersifat paling kurang intens, dan yang paling umum.
2. Adaptasi (*adaptation*). Seperti halnya *tuning*, adaptasi mencakup perubahan-perubahan inkremental. Tetapi kini perubahan-perubahan yang terjadi berupa reaksi terhadap problem-problem eksternal, kejadian-kejadian, atau tekanan-tekanan yang dihadapi organisasi yang bersangkutan.
3. Reorientasi (*reorientation*) tipe perubahan ini bersifat antisipatoris, dan skopenya adalah strategis. Nadler dan Tushman menamakan "reorientasi"

mengubah frame (*frame bending*) karena organisasi yang bersangkutan secara signifikan diubah.

4. Re-Kreasi (*recreation*) tekanan-tekanan kompetitif, normal menyebabkan timbulnya tipe perubahan keorganisasian demikian yang bersifat lebih intens dan penuh risiko. Istilah Nadler dan Tushman di sini adalah “*frame breaking*”.

Ada tiga model perubahan yang diangkat dalam buku Winardi,

diantaranya :

- a. Model *Action Research*
- b. Model dari Kurt Lewin
- c. Model dari Lippitt, Watson, dan Wesley.

Menurut Wendell L. French (dalam Miftah Thoha, 1993 ; 42), *Action*

Research mempunyai beberapa tingkatan, di antaranya :

- a. Identifikasi masalah
- b. Konsultasi dengan Ahli Ilmu Perilaku
- c. Pengumpulan data dan diagnosa awal oleh konsultan.
- d. Umpan balik kepada klien atau kelompok
- e. Diagnosa bersama terhadap masalah
- f. Tindakan (*action*)
- g. Pengumpulan data setelah fase tindakan

Metode dari Kurt Lewin (dalam Miftah Thoha, 1993 : 51), menurut

Lewin tiga langkah prosedurnya tersebut ialah :

- a. Pencairan (*unfreezing*). Langkah ini meliputi usaha penurunan tegangan-tegangan dalam suatu organisasi ke taraf yang ada pada saat sekarang.
- b. Tindakan (*movement*). Ialah melakukan tindakan yang akan mengubah sistem sosial dari tingkat perilaku aslinya ke suatu tataran perilaku yang baru.
- c. Pengentalan kembali (*refreezing*). Berusaha menstabilkan organisasi pada suatu tingkat keseimbangan yang baru. Pencapaian menggunakan mekanisme yang membantu antara lain dapat berupa kultur organisasi, norma organisasi, kebijaksanaan, dan struktur organisasi.

Fase perubahan berencana dari Lippit, Watson, dan Wesley (dalam Winardi,1993: 53). Mereka memilih istilah fase sebagai pengganti langkah, yang mempunyai pengertian agak bebas. Fase-fase tersebut antara lain :

- a. Pengembangan suatu kebutuhan untuk melakukan perubahan (*Unfreezing* – Lewin).
- b. Menciptakan suatu tata hubungan perubahan.
- c. Melakukan perubahan. (*Moving* - Lewin).
- d. Generalisasi dan stabilisasi dari perubahan tersebut (*Refreezing*- Lewin).
- e. Pencapaian suatu tata hubungan terminal.

Dalam struktur organisasi pemerintah dalam hal ini organisasi perangkat daerah (menurut PP No. 8 Tahun 2003. Bab; IV pasal; 16) ada perbedaan antara badan dan kantor di lihat dari susunan organisasinya.yaitu; Badan terdiri dari 1(satu) Bagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bidang. Bidang Tata Usaha terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) sub bidang. Sedangkan kantor terdiri dari 1 (satu) sekretariat, sebanyak-banyaknya 5 (lima) seksi, dan kelompok jabatan fungsional.

3. Evaluasi dan Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan adanya pemenuhan otonomi daerah, pemerintah telah banyak mengeluarkan program-program pembangunan termasuk didalamnya dibidang kesehatan reproduksi dalam hal ini melalui BKKBN. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai keefektifan dan pengaruh yang ditimbulkan oleh program-program tersebut dengan cara mengevaluasi dan mengukur seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari kebijakan atau program tersebut. Sehingga nantinya dihasilkan suatu bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan

kebijakan/ program-program selanjutnya. Bahan pertimbangan ini dapat diperoleh dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan/ program-program pemerintah.

Untuk mengetahui maksud dan makna dari evaluasi diperlukan pemahaman mengenai kebijakan. Hal ini disebabkan karena obyek dari evaluasi umumnya adalah kebijakan dan program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Mustopaadidjaja dalam Hanif Nurcholis (2005:158) memberikan definisi kerja tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Sedangkan menurut pendapat Anderson dalam Irfan Islamy (2003:17), kebijakan diartikan sebagai “*A purposive course of action followed by an actor in dealing with a problem or matter of concern*”. (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Sementara itu, Carl Friedrich mendefinisikan Kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya memberi peluang-peluang untuk mencapai tujuan, atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (Solichin A. Wahab, 2005:3)

Dari ketiga pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut William N Dunn (2000 : 132), evaluasi adalah prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan aksi di masa lalu dan atau di masa depan. Dunn (dalam Riant Nugroho, 2003 :185) juga menambahkan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*).

Sementara itu, Subarsono berpendapat bahwa Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Subarsono juga menambahkan bahwa untuk dapat mengetahui outcome dan dampak suatu kebijakan membutuhkan batasan waktu tertentu, sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini dikhawatirkan outcome dan dampak belum nampak. (2005:119)

Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu bentuk penilaian yang dilakukan dengan cara menganalisis terhadap suatu aksi/ tindakan yang dilakukan. Evaluasi biasanya dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan atau program-program yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Definisi program menurut Mohammad Mahsun (2006 : 41) adalah kegiatan pokok yang akan dilaksanakan organisasi untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi. Sedangkan menurut Samoedra Wibawa (1994 : 29), suatu evaluasi program tidak terlepas dari kerangka input-output, apa

yang telah menjadi input suatu program dan apa keluaran setelah diberlakukannya suatu program.

Definisi evaluasi kebijakan menurut Samodra adalah aktivitas ilmiah yang perlu dilakukan oleh para pengambil kebijakan di dalam tubuh organisasi pemerintah maupun organisasi sosial dan politik. (1994 : V)

Kemudian Menurut Budi Winarno (2002 : 166), evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Sedangkan menurut Riant Nugroho (2003 : 184), evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan.

Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pengambil kebijakan terhadap perumusan, pelaksanaan, maupun dampak bagi lingkungan.

Menurut Edward A. Suchman (dalam Riant Nugroho, 2003 :199), kegiatan evaluasi kebijakan mencakup enam langkah, yaitu :

- a. Analisis terhadap masalah,
- b. Diskripsi dan standardisasi kegiatan,
- c. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
- d. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain,
- e. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Secara rinci, Ripley (dalam Samodra, 1994 : 8) mengemukakan beberapa persoalan yang harus dijawab oleh suatu kegiatan evaluasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Kelompok dan kepentingan mana yang memiliki akses di dalam pembuatan kebijakan?
- b. Apakah proses pembuatannya cukup rinci, terbuka, dan memenuhi prosedur?
- c. Apakah program di desain secara logis?
- d. Apakah sumber daya yang menjadi input program telah cukup memadai untuk mencapai tujuan?
- e. Apa standar implementasi yang baik untuk kebijakan tersebut?
- f. Apakah program dilaksanakan sesuai standar efisiensi dan ekonomi? Apakah uang digunakan dengan jujur dan tepat?
- g. Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan dan barang seperti yang didesain dalam program?
- h. Apakah program memberikan dampak pada kelompok non-sasaran? Apa jenis dampaknya?
- i. Apa dampaknya, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan bagi masyarakat?
- j. Kapan tindakan program dilakukan dan dampaknya diterima oleh masyarakat?
- k. Apa tindakan dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan?

Suatu program maupun kebijakan seringkali berhenti pada tahap implementasi, tanpa diikuti adanya evaluasi. Dalam melakukan evaluasi, evaluator dihadapkan oleh banyak persoalan dan kendala. Samodra (1994 : 95), mengemukakan bahwa kendala-kendala yang ditemukan dalam evaluasi, yaitu :

- a. Penelitian evaluasi tidak selalu di terima dan didukung oleh para administrator.
- b. Konflik antara kepentingan program dengan kepentingan penelitian berlangsung atas sumber daya maupun tujuan.
- c. Masalah waktu yang mungkin dianggap mengganggu kesibukan para praktisi.

- d. Adanya kelompok sasaran yang mungkin tidak antusias melayani wawancara peneliti.
- e. Masalah dana, dimana muncul sikap dari administrator memperhitungkan rupiah yang akan diterimanya sebelum memutuskan terlibat ke suatu program.
- f. Konflik tujuan antara kepentingan program dan evaluasi yaitu pada isu perubahan program.

Sedangkan Subarsono (2005 : 130) memberikan beberapa identifikasi mengenai kendala dalam melakukan evaluasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kendala psikologis. Adanya asumsi bahwa kegiatan evaluasi bisa mendatangkan masalah bagi individu tertentu menimbulkan kesulitan bagi evaluator untuk melakukan evaluasi.
- b. Kendala ekonomis. Kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan apabila tidak di dukung dengan finansial yang bagus, kegiatan evaluasi tidak akan berjalan dengan baik.
- c. Kendala teknis. Masalah yang sering terjadi yaitu tidak tersedianya data dan informasi yang *up to date*.
- d. Kendala politis. Adanya “kerjasama” untuk saling menutupi kelemahan implementasi program oleh kelompok-kelompok tertentu seringkali menggagalkan proses evaluasi.
- e. Kurang tersedianya evaluator. Adanya keterbatasan akan sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan evaluasi merupakan kendala dalam melakukan kegiatan evaluasi itu sendiri.

Sementara itu, menurut Langbein (dalam Subarsono, 2005 :126) menyusun kriteria atau indikator program-program publik terdiri dari tiga, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi, (2) distribusi keadilan, dan (3) preferensi warga negara.

Di tangan aktor kebijakan, evaluasi memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu memberikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan. Dengan melakukan evaluasi pemerintah dapat meningkatkan efektivitas program-program mereka sehingga meningkat pula kepuasan publik terhadap kebijakan pemerintah. (Samodra Wibowo dkk, 1994 : V)

Dalam (Riant Nugroho 2003 : 186), Dunn memberi gambaran secara umum mengenai kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik.

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan	Unit biaya, Manfaat bersih, Rasio <i>cost-benefit</i>
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah	Biaya tetap, Efektifitas tetap
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda	Kriteria pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai	Program publik harus merata dan efisien

Cook dan Scioli (dalam Samodra, 1994 :5) menjelaskan bahwa setiap program yang diturunkan dari kebijakan mempunyai beberapa tujuan dan setiap tujuan dapat dicapai dengan beberapa tindakan.

Menurut Dunn dan Ripley (dalam Samodra Wibawa : 10), Secara keseluruhan evaluasi memiliki empat fungsi, yaitu sebagai berikut :

a. Eksplanasi

Melalui evaluasi dapat di potret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya.

b. Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun perilaku lain sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kebijakan.

c. Auditing

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran maupun penerima lain (individu, keluarga, organisasi, birokrasi desa, dan lain-lain) yang dimaksudkan oleh pembuat kebocoran.

d. Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Sedangkan menurut pendapat Subarsono (2005 : 120), evaluasi memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :

a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan

Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan.

Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan.

Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.

d. Mengukur dampak suatu kebijakan.

Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.

e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.

Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik

Kemudian Budi Winarno menambahkan bahwa evaluasi kebijakan secara minimum memiliki tujuan agar kita mengetahui apa yang ingin dicapai dari suatu

kebijakan tertentu (tujuan-tujuan kebijakan), bagaimana kita melakukannya (program-program), dan jika ada, apakah kita telah mencapai tujuan (dampak atau akibat dan hubungan kebijakan) yang telah ditetapkan sebelumnya. (2002 : 170)

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungannya dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan. Mengacu pada pentingnya bagian ini, maka peneliti harus dapat membuat kerangka pemikiran yang jelas dan mudah dipahami.

Seiring dengan adanya kebijakan otonomi daerah, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memungkinkan tiap-tiap daerah dapat mengelola daerahnya secara lebih terbuka dengan adanya desentralisasi. Dengan dasar undang-undang yang mengatur mengenai otonomi daerah tersebut maka sebagian wewenang yang dahulu berada di tangan pemerintah pusat perlahan-lahan mulai dilimpahkan kepada daerah. Hal ini berdampak pula terhadap susunan instansi-instansi pemerintah yang ada di daerah, hal ini di sebabkan karena adanya pelimpahan wewenang yang termasuk didalamnya adanya penyerahan pengaturan kelembagaan dan instansi yang diserahkan kepada masing-masing daerah termasuk diantaranya adalah instansi BKKBN.

Pelimpahan tersebut didasari dengan adanya Keputusan Presiden Nomor : 103 Tahun 2001 yang mana BKKBN merupakan salah satu instansi pemerintah

yang harus diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Hal ini pun ditidakanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan terbitnya peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2003 yang memuat Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

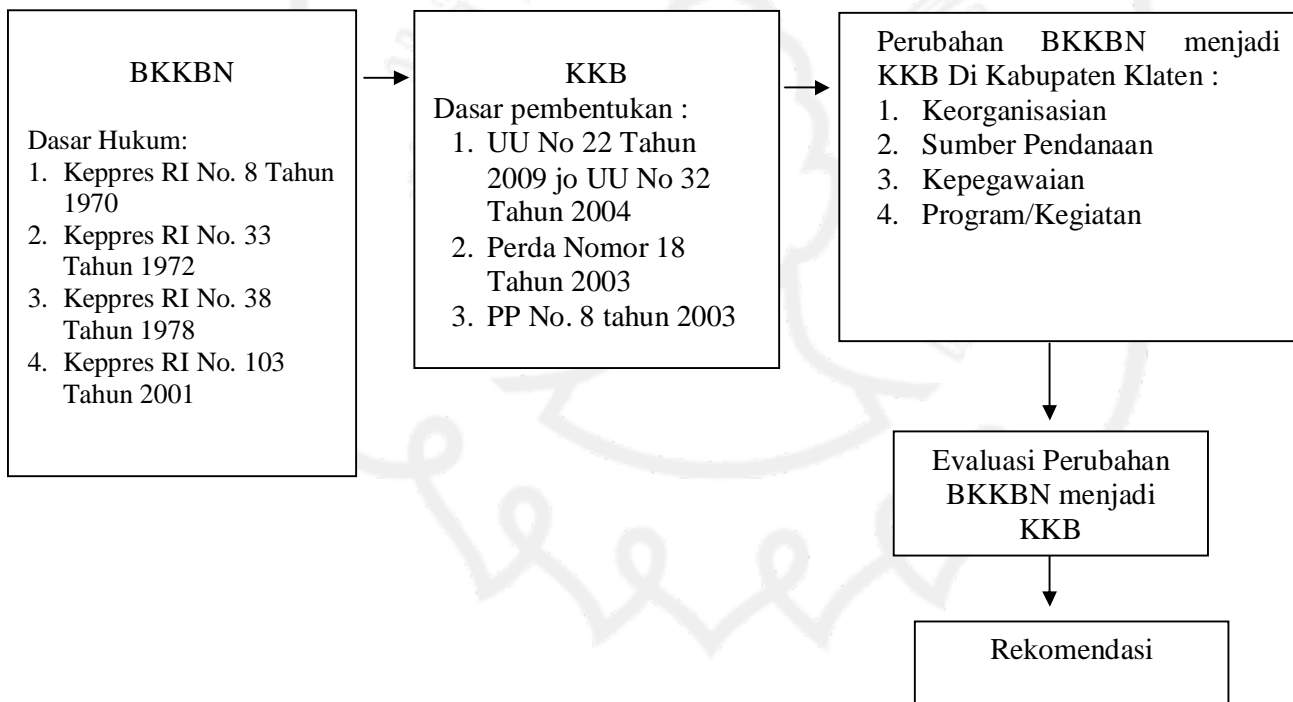
Tentunya perubahan instansi (perubahan BKKBN menjadi KKB) ini membawa suatu masalah tersendiri bagi Pemerintah Daerah kabupaten Klaten, yang mana ini menjadi tanggungjawab pihak Pemerintah Daerah Klaten untuk dapat melaksanakan dan mengoperasikan instansi tersebut. KKB Kabupaten Klaten merupakan penerapan dari otonomi daerah dan sebuah jawaban bahwa keberadaan kebijakan keluarga berencana di Kabupaten klaten masih dibutuhkan.

Dalam penelitian yang hendak di evaluasi adalah perubahan organisasi dari BKKBN menjadi KKB Kabupaten Klaten. Dimana bentuk organisasinya berubah dari yang semula berbentuk badan berubah menjadi kantor. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 pada Bab IV Pasal 16, disitu dijelaskan bahwa badan terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha yang terdiri sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub bidang, dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bidang, sedangkan Kantor terdiri dari 1 (satu) sekretariat, sebanyak-banyaknya 5 (lima) seksi, dan kelompok jabatan fungsional. Dengan demikian perubahan yang secara jelas terjadi jika dilihat dari perubahan dari badan mejadi kantor jika dilihat dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 pada Bab IV Pasal 16 adalah adanya perubahan pada struktur organisasi. Selanjutnya, hasil

dari perubahan yang terjadi tersebut ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan hasil maupun dampak yang terjadi akibat adanya perbedaan susunan organisasi dengan menggunakan perbandingan organisasi saat masih menjadi BKKBN dibandingkan dengan setelah berubah menjadi KKB, sehingga akan diperoleh hasil evaluasi. Hasil evaluasi ini akan dapat menjadi bahan rekomendasi maupun pertimbangan bagi institusi ini.

Adapun alur kerangka pemikiran yang digunakan dapat di lihat dari gambar berikut :

Gambar 1.1 : Skema kerangka pemikiran.



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan didukung data kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Lexy J Moeleong (2002:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Hal ini dilakukan mengingat dalam penelitian ini perlu memaparkan, menginterpretasikan, dan menganalisa data-data ataupun gejala-gejala yang ditemukan sehubungan dengan perubahan BKKBN menjadi KKB di Kabupaten Klaten Berdasarkan arah kajian tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai dampak dari perubahan BKKBN menjadi KKB Kabupaten Klaten.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Klaten dengan mengambil lokasi di Kantor KKB. Pemilihan lokasi penelitian didasari atas pertimbangan bahwa Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Klaten merupakan sasaran maupun obyek langsung dari kebijakan perubahan tersebut dengan berdasar Perda Nomor 18 Tahun 2003 yang mengacu pada penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Klaten. Pada lokasi ini terdapat sesuatu yang berbeda dalam hal perubahan yang terjadi dalam tubuh instansi KB, dimana campur tangan kepala daerah (bupati) dalam mewujudkan perubahan ini sangat besar tanpa memandang efektivitas dan efisiensi organisasi.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri yang diperoleh melalui wawancara langsung. Sedangkan pihak yang diwawancarai yaitu :
 - Kepala KKB Kabupaten Klaten
 - Petugas Lapangan (PPL KB)
 - Pegawai instansi KKB Kabupaten Klaten.(diutamakan pegawai saat masih menjadi BKKBN dan setelah Menjadi KKB)
 - Masyarakat sebagai akseptor KB
 - Informan lain jika diperlukan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, yang biasanya berbentuk publikasi, antara lain sebagai berikut :
 - Peraturan Daerah Kabupaten Klaten yang mengatur tentang organisasi KB;
 - SOT Kabupaten Klaten
 - Keppres RI No. 8 Tahun 1970;
 - Keppres RI No. 33 Tahun 1972;
 - Keppres RI No. 38 Tahun 1978;
 - Keppres RI No. 103 Tahun 2001;
 - UU No. 22 tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti memvariasikan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode, metode yang digunakan antara lain :

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan komunikasi verbal yang bertujuan untuk mendapatkan informasi berupa data primer dari informan. Dalam penelitian ini teknik wawancara merupakan pengumpulan data yang utama. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam (indepth interview). Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat “open ended” dan mengarah pada kedalaman informasi. Hal ini dilakukan guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasi secara lebih jauh dan mendalam. Dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden. (HB.Sutopo, 2002: 59).

Dalam penelitian ini, menggunakan tipe wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan membuat pedoman yang mengarahkan jawaban informan. Wawancara dilakukan pada responden yang telah ditentukan melalui teknik wawancara mendalam (indepth interview) guna mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data-data, dokumen-dokumen, dalam rangka mengumpulkan data-

data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa demi kesempurnaan analisis. Dokumentasi dilakukan untuk mengambil dokumen dan literatur sebagai pelengkap informasi bagi peneliti. Data-data tersebut kemudian dianalisis untuk mendukung dan menguatkan bukti yang diperoleh melalui data primer. serta mengambil dokumen dan literatur sebagai pelengkap informasi bagi peneliti.

Dalam penelitian ini data dokumen yang diambil adalah data yang berkaitan dengan dokumen keorganisasian KKB Kabupaten Klaten terutama dokumen-dokumen yang menjadi dasar dari perubahan BKB menjadi KKB seperti peraturan Bupati Klaten, peraturan Daerah, serta Undang-undang.

5. Teknik Penarikan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian yang bermaksud untuk melihat, memahami dan menginterpretasikan dampak yang ditimbulkan dari perubahan BKB menjadi KKB di Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*.

Dalam *purposive sampling* ini peneliti mempunyai/memiliki kecenderungan untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan permasalahannya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Dalam tahap pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemandapan peneliti dalam memperoleh data (HB. Sutopo, 2002: 36)

6. Validitas Data

Patton dalam H.B. Sutopo (1988 : 21) menyatakan ada empat macam triangulation, yaitu (1) *data triangulation*, dimana peneliti menggunakan beberapa sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data yang sama; (2) *investigator triangulation*, yaitu pengumpulan data sejenis yang dikumpulkan oleh beberapa orang peneliti; (3) *Methodological triangulation*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda ataupun dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda : dan (4) *theoretical triangulation*, yaitu peneliti melakukan penelitian tentang topik yang sama dan data yang dianalisis dengan menggunakan berbagai perspektif.

Untuk menguji keabsahan data yang telah terkumpul sehingga dapat diperoleh validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini digunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2004:178) Menggunakan sumber data yang berbeda-beda, maka penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Moleong,2004:178). Misalnya dalam mengevaluasi keorganisasian maka peneliti membandingkan data publikasi dari KKB dengan mengkroscekan data dari informan yang terkait serta orang lain yang mengerti

permasalahan. Dengan demikian maka dapat di ketahui apakah data yang dipublikasikan memang sesuai (valid) atau tidak dengan apa yang diterangkan oleh informan. Cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data menggunakan beragam sumber data yang tersedia, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila lebih digali dari beberapa sumber data yang berbeda.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton dalam Lexi J Moleong (2002:103) adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar untuk mengolah dan menganalisis data penulis. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif.

Model analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif dimana model ini mempunyai 3 komponen analisis, yaitu: reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan serta verifikasi yang berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Dalam proses analisis terdapat tiga komponen yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis, tiga komponen tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.

b. Sajian Data

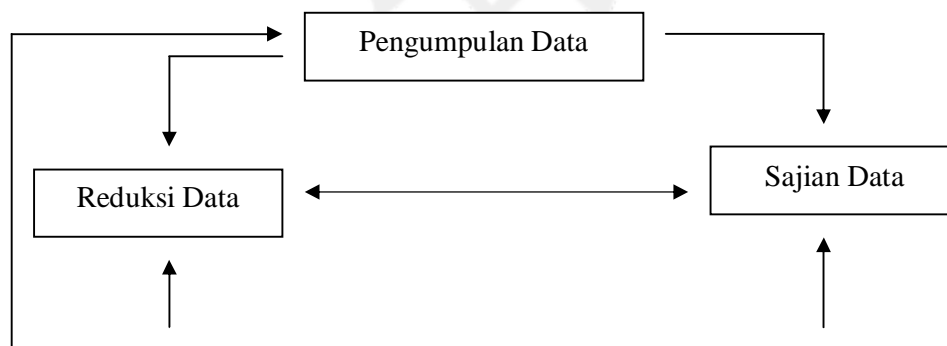
Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi, kalimat, matriks, gambar/skema, tabel maupun grafik yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami yang mempermudah melakukan penarikan simpulan.

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Dari awal pengumpulan data peneliti sudah harus memahami arti dari berbagai data yang diperoleh. Simpulan akhir baru akan diperoleh setelah proses pengumpulan data berakhir. Agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, setelah penarikan simpulan perlu verifikasi. Pada dasarnya makna data perlu diuji validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan dapat dipercaya. (HB. Sutopo. 2002: 93). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaktif yaitu: reduksi data, sajian data serta penarikan simpulan dan verifikasi berjalan bersama pada waktu kegiatan pengumpulan data sebagai atau siklus yang berlangsung sampai akhir penelitian.

Proses analisis data dengan menggunakan model interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. 6
Model Analisis Interaktif





(Sumber : H. B. Sutopo, 2002 : 96)

Keterangan :

Data yang telah terkumpul kemudian direduksi dengan cara penyeleksian dan penyederhanaan. Kemudian dilakukan penyusunan sajian data dan penarikan kesimpulan. Keseluruhan tahap ini tidak harus dilakukan secara urut yang memungkinkan adanya penilaian data kembali setelah memiliki gambaran mengenai kesimpulan.

BAB II

DESKRIPSI LOKASI

A. Letak dan Data Geografis Kabupaten Klaten

Secara geografis Kabupaten Klaten terletak diantara $110^{\circ}30'$ - $110^{\circ}45'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}30'$ - $7^{\circ}45'$ Lintang Selatan. Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai $665,56 \text{ km}^2$. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Boyolali. Menurut topografi Kabupaten Klaten terletak diantara gunung Merapi dan pegunungan

Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter diatas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan.

Ditinjau dari ketinggiannya, wilayah kabupaten Klaten terdiri dari dataran dan pegunungan, dan berada dalam ketinggian yang bervariasi, yaitu, 9,72% terletak di ketinggian 0-100 meter dari permukaan air laut dan 77,52% terletak di ketinggian 100-500 meter dari permukaan air laut dan 12,76% terletak di ketinggian 500-1000 meter dari permukaan air laut.

Keadaan iklim Kabupaten Klaten termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur udara rata-rata 28-30° Celsius dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 mm setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi bulan Januari (350mm) dan curah hujan terendah bulan Juli (8mm) (sumber; www.klaten.go.id).

B. Sejarah BKKBN di Kabupaten Klaten

Periode Tahun 1970 - 1980

Secara resmi Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia berdiri pada tahun 1970 dengan diterbitkannya Keppres RI No. 8 tahun 1970. Pada periode ini merupakan periode awal pelaksanaan program KB secara Nasional maupun di Kabupaten Klaten. Pada awal pelaksanaan Program KB di Kabupaten Klaten dijadikan satu dengan program-program kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Dimana Program Keluarga Berencana masuk dalam program dari Seksi

kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang pada saat itu (tahun 1970) Kasi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dijabat oleh dr. Noerul Soeherman.

Kemudian pada tahun 1972 atau dua tahun setelah pencaangan dan pembentukan BKKBN, dirasakan bahwa organisasi yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kemajuan dan perluasan program KB serta fungsi pokok BKKBN yang meliputi merencanakan, menilai, mengawasi tidak tergambar dengan jelas pada Kepres RI No. 8/1970; maka atas dasar hal tersebut organisasi BKKBN disempurnakan dengan adanya Kepres No. 33 Tahun 1972. Dimana didalam Keppres tersebut status dari BKKBN dipertegas sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden.

Pada waktu itu BKKBN Kabupaten Klaten mendapatkan tambahan tenaga yang dinamakan *Group Leader* (pengawas) petugas lapangan KB, yang pada waktu itu dijabat oleh Ny. Mardiyem, yang ditambah dengan 15 orang petugas lapangan Keluarga Berencana. Dimana pada waktu itu petugas lapangan KB merupakan hasil kebijakan (proyek) dari BKKBN Pusat.

Sementara itu pada tahun 1978 pelaksanaan Program KB pun telah memasuki tahapan yang memerlukan dukungan kebijakan kependudukan secara menyeluruh, khususnya yang dapat membantu meningkatkan penurunan tingkat fertilitas. Dimana dalam pembangunan program tersebut menuntut peningkatan dan pengembangan organisasi yang lebih lanjut dan perlunya diadakan perubahan organisasi BKKBN yang kemudian direalisasikan dengan terbitnya Keppres No. 38 Tahun 1978. Dimana didalam Keppres tersebut menyertakan tambahan program baru yakni mengenai kependudukan. Pada tahapan ini mulai dibentuk unit-unit

pelaksana KB serta pada setiap Kecamatan dibentuk Pengawas PLKB (petugas lapangan Keluarga Berencana) dan juga pembentukan kader KB di tingkat desa. Dan kemudian pada akhir periode ini Group Leader dihapuskan dan kemudian PLKB bukan lagi merupakan proyek BKKBN Pusat, serta diupayakan untuk dapat diangkat menjadi pegawai negeri.

Pelaksanaan Program KB Nasional pada era tahun 1970 – 1980 pendekatan programnya lebih bersifat perorangan atau pribadi dan lebih didasarkan pada pertimbangan kesehatan. Dalam perkembangannya kemudian kegiatan program KB semakin luas dan dirasa perlu mendirikan Klinik Keluarga Berencana. Ketika kemudian pemerintah ikut menangani program KB secara langsung dan kemudian program KB menjadi program pemerintah maka pelayanan di klinik KB diperluas lagi dengan menggunakan pelayanan klinik pemerintah yakni dengan melalui departemen Kesehatan, ABRI (TNI) dan juga merangkul swasta untuk terlibat di dalamnya.

Adapun beberapa kegiatan program KB tahun 1970 – 1980, antara lain :

a. Melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)

Antara lain melalui radio, televisi, pers, mobil unit penerangan, juru penerangan, dan PLKB dengan kegiatan kunjungan ke rumah – rumah

KIE ini dilakukan melalui 3 macam kegiatan, antara lain :

1) KIE Massa

Kegiatan ini dilakukan melalui media massa yang sarasannya adalah masyarakat luas.

2) KIE Kelompok.

Kegiatan ini dilakukan oleh para petugas KIE melalui pertemuan- pertemuan kelompok dengan sasaran yang selektif.

3) KIE Wawanmuka.

Kegiatan ini dilakukan oleh para petugas lapangan KB, motivator KB, dan PPKBD (petugas pembantu KB desa) dengan sasaran perorangan.

b. Pelayanan Kontrasepsi.

Diantaranya dengan melalui :

- 1) Pelayanan kepada peserta KB di klinik KB dengan sasaran pasangan usia subur (PUS)
- 2) Pelayanan Tim Medis keliling yang menjangkau peserta KB.
- 3) Mendekatkan penyaluran alat kontrasepsi sampai ke desa – desa oleh petugas PPKBD.

c. Kegiatan penunjang program KB.

- 1) Mengadakan kegiatan pendidikan dan latihan bagi petugas KB serta mitra kerja agar dapat dihasilkan tenaga yang profesional.
- 2) Penyaluran logistic berupa penyaluran alat kontrasepsi ke daerah – daerah yang disesuaikan kebutuhan.

- 3) Pengembangan status personalia pegawai BKKBN.
- 4) Pengembangan system pencatatan dan pelaporan yang lebih detail. Dan lain – lain.

Tiga dimensi dalam pelaksanaan program KB kurun waktu 1970 – 1980 :

a. Perluasan jangkauan.

Meliputi usaha mengajak peserta KB baru serta institusi – institusi baru yang diharapkan dapat ikut mngelola program kependudukan dan keluarga berencana.

b. Pembinaan.

Meliputi usaha memantapkan penerimaan gagasan keluarga berencana secara lestari, tidak dalam keikutsertaan sebagai peserta KB maupun dalam kelanjutan pengelolaan program.

c. Pelembagaan dan Pembudayaan.

Meliputi usaha meningkatkan diterimanya NKKBS, dalm hal ini termasuk pula usaha meningkatkan peranan penggarapan program Kb secara efektif dan mantap.

Dalam pelaksanaanya, tahapan seperti di atas tidak berjalan sendiri – sendiri secara terpisah tetapi bergerak serentak secara menyeluruh dalam kgiatan pencapaian hasil program.

Periode Tahun 1981 - 1990

1. Visi dan Misi BKKBN pada Periode ini:
 - a. Visi

Visi atau tujuan normative program KB adalah keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (NKKBS) yang pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga serta kesehatan ibu dan anak yang secara demografis bertujuan untuk menurunkan dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.

b. Misi

Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam program :

- 1). Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
- 2). Pengaturan Kelahiran.
- 3). Pembinaan Ketahanan keluarga.
- 4). Peningkatan kesejahteraan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia.

2. Tujuan dan Sasaran BKKBN Kabupaten Klaten, antara lain :

a. Tujuan

Tujuan Umum :

Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan sikap dan perilaku keluarga kecil dan berkualitas yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang handal.

Tujuan Khusus :

- 1). Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengaturan kelahiran.

- 2). Meningkatkan kwalitaas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga untuk menuju kepada keluarga yang lebih sejahtera.
- 3). Semakin berkembangnya program kependudukan yang memberikan dukungan pada peningkatan kualitas keluarga dan penduduk.

b. Sasaran

- 1). Pasangan usia subur (PUS) dengan istri yang berusia antara 15 – 44 tahun dan masih dalam keadaan subur. PUS tersebut khususnya PUS muda dan PUS paritas tinggi terus dimotivasi sehingga mereka menjadi peserta KB lestari yang akan memberikan dampak terhadap penurunan fertilitas yang cukup bermakna.
- 2). Semua masyarakat selain PUS yang terdiri dari balita, anak remaja, orang dewasa dan belum menikah, pasangan suami istri di atas 45 tahun, kelompok lansia dan para tokoh masyarakat dan agama sebagai sasaran program KB. Khususnya bagi generasi muda diajak untuk sadar akan NKKBS.
- 3). Organisasi dan lembaga masyarakat baik instansi pemerintah maupun swasta, perusahaan, pondok pesantren dan lain-lain diajak dan di bina untuk mempercepat proses pelembagaan dan pembudayaan NKKBS dalam masyarakat.

c. Kebijakan

Secara umum kebijaksanaan program KB adalah mewujudkan keluarga kecil dengan catur warga yang bahagia dan sejahtera serta mendorong seluruh sector pembangunan untuk menjadikan penduduk sebagai factor penunjaang pembangunan dan diarahkan untuk mempercepat penerimaan NKKBS sebagai cara hidup yang layak dan bertanggung jawab, serta mendorong dan menjadikan program KB sebagai gerakan masyarakat.

Secara khusus antara lain :

- 1). Meningkatkan jumlah dan mutu peserta KB aktif dengan menggunakan alat kontrasepsi yang semakin efektif.
- 2). Meningkatkan pemerataan pencapaian program KB sampai tingkat wilayah kecamatan dan desa.
- 3). Meningkatkan usaha peelembagaan peserta KB dengan memberikan pengayoman dan pembinaan secara maksimal.
- 4). Meningkatkan koordinasi secara aktif di segala bidang dengan sektor – sektor pembangunan lain, agar lebih bermanfaat untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan.

3. Pengorganisasian.

Pada periode ini, organisasi BKKBN sudah semakin mantap. Dilihat dari struktur orgaanisasinya, BKKBN Kabupaten Klaten termasuk type A dengan jumlah personil mencapai 173 personil, terdiri dari :

- 1). Personil kantor : 25 orang, terdiri dari :
 - Kepala kantor : 1 orang

- Kasubag TU : 1 orang
- kepala seksi : 2 orang
- Kepala Urusaan : 5 orang
- BPUMC : 1 orang
- Staf : 7 orang
- Pengemudi : 3 orang
- Pesuruh : 4 orang
- Penjaga malam : 1 orang

2). Personil lapangan (PLKB) :

- Pengawas PLKB : 23 orang
- PLKB : 125 orang

Pada akhir periode ini yakni pada tahun 1989 terjadi pergantian kepala BKKBN Kabupaten Klaten dari Ibu dr. Noeroel Soeherman diganti dengan Bapak Pambudi Koesmiarto, SH. Sampai pada tahun 1990 kondisi personil di BKKBN Kabupaten Klaten sudah berkembang menjadi 215 orang, yng terdiri dari :

- 1). Personil Kantor : 40 orang
- 2). Personil Lapangan
 - pengawas PLKB : 23 orang
 - Staf pengawaas PLKB : 23 orang
 - PLKB : 129 orang

4. Hasil program.

- a. Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

Kegiatan KIE bertujuan untuk menyebarluaskan pesan- pesan KB. Agar pesan KB tersebut dapat merata menjangkau sasaran di tingkat basis sesuai segmentasi pasar yang ada. Berikut yang dilakukan dalam kegiatan KIE, antara lain :

1. Radio spot yang dilaksanakan melalui RSPD & RWK Klaten.
 2. Sandiwra radio yang dilaksanakan dan bekerjasama dengan Deppen & RSPD Klaten yang salah satunya adalah kumandanging potret kamardikan.
 3. Penerangan kelompok yang di tujukan kepada pra PUS, dan peserta KB.
 4. Oprasional Mobil Unit Penerangan (Mupen)
 5. Penerangan wawan muka yang dilaksanakan oleh PLKB, SKD, Pengurus KB, yang sistemnya adalah kunjungan door to door (kunjungan kerumah target KB)
- b. Pelayanan kontrasepsi.

Di dalam menjangkau kegiatan pelayanan kontrasepsi yang lebih merata dan lebih luas terhadap sasaran yang tersebar tempatnya, dilaksanakan dengan sarana pelayanan yang ada yaitu :

1. Rumah sakit / pelayanan KB rumah sakit.
2. KKB / Klinik KB (tersebar sebanyak 38 klinik di seluruh kabupaten)
3. Apotik dan toko obat.
4. TKBK Yandu.

5. SKD dan PKB.

c. Pembinaan institusi masyarakat dan pembudayaan KB.

Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung percepatan alih pengelola program KB dan pelaksanaan program integrasi sehingga tercipta pelembagaan dan pembudayaan NKKBS, yang antara lain dengan :

1. penyuluhan KB yang idealnya terdapat di tiap dukuh namun PKB belum dapat menjangkau semua dukuh yang kecil sehingga di dalam kegiatan PKB, sehingga dukuh – dukuh kecil tersebut digabungkan dengan kategori PKB dasar dan pengembangan.
2. Pembinaan SKD sebanyak 401 agar mampu membantu pelaksanaan program KB di desanya masing – masing dengan membantu penyaluran alat kontrasepsi pil dan kondom setiap bulan.
3. Pendatan KB lestari dan lembaga institusi guna menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai peserta KB yang lestari maka setiap 2 tahun sekali pemerintah memberikan piagam penghargaan kepada peserta Kb lestari .

d. Kegiatan jaringan informasi dan dokumentasi (JID).

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang yang dilaksanakan untuk memperluas informasi dan data – data KB agar masyarakat yang membutuhkan informasi / data KB dapat terlayani. Adapun anggota JID Kabupaten Klaten yaitu : Deppen, Deperindag Kop, Dik Bud, Depag, Depkes, dan bagian sosial Setda Kabupaten klaten.

Periode Tahun 1991 – 2000

1. Visi dan Misi BKKBN pada Periode ini

a. Visi

Visi atau tujuan normative program KB adalah keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (NKKBS) yang pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga serta kesehatan ibu dan anak yang secara demografis bertujuan untuk menurunkan dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.

b. Misi

Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam program :

- 1). Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
- 2). Pengaturan Kelahiran.
- 3). Pembinaan Ketahanan keluarga.
- 4). Peningkatan kesejahteraan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia.

Pada periode ini tidak terdapat suatu perkembangan ataupun perubahan visi dan misi yang ingin dicapai BKKBN hal ini dapat dilihat dari visi dan misi yang masih sama dengan periode yang lalu.

2. Tujuan, Sasaran, Kebijakan & Strategi BKKBN Kabupaten Klaten, antara lain :

a. Tujuan

Pada periode ini tujuan umum dari BKKBN masih serupa dengan periode yang lalu dengan tanpa adanya perubahan. Namun didalam periode ini BKKBN mempunyai beberapa penambahan tujuan khusus. Diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan kualitas dan kuantitas institusi masyarakat di semua wilayah untuk mendukung penurunan tingkat kelahiran dan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
- 2). Meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan keluarga sejahtera melalui gerakan KB Nasional.

b. Sasaran

Pada periode ini BKKBN mempunyai sasaran antara lain :

- 1). Pemantapan koordinasi, keterpaduan, dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera melalui Gerakan KB Nasional.
- 2). Kualitas kesertaan ber-KB yang tercemin dari peningkatan kelembagaan dan kemandirian peserta KB.
- 3). Pemerataan pelayanan KB yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, kepentingan program dan pemenuhan standart pelayanan.
- 4). Meningkatnya kualitas keluarga dan pemahaman tentang keluarga sejahtera dengan delapan fungsi keluarga.
- 5). Kualitas pelebagaan KB dan pembangunan keluarga sejahtera.

- 6). Terlaksananya perencanaan yang handal, penyediaan data dan informasi yang akurat, cepat, menyeluruh dan terpadu.

c. Kebijakan dan Strategi

1). Kebijakan

- Mengintegrasikan pelayanan program KB dalam konsep umum pelayanan kesehatan reproduksi.
- Meningkatkan kualitas pelayanan KB dalam rangka kesehatan reproduksi.
- Menyelenggarakan jaminan kontrasepsi bagi keluarga miskin atau pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta.
- Meningkatkan kualitas keluarga dan kemandirian untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketahanan keluarga melalui kegiatan – kegiatan bina keluarga yang meliputi BKB, BKR, dan BKL.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat terutama pra sejahtera dan KS I dalam pemberdayaan ekonomi keluarga melalui : Takesra, kukesra, UPPKS, dan KPKU.

2). Strategi

- Koordinasi, keterpaduan dan kemitraan.
- Penajaman segmentasi pasar.

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Peningkatan kualitas pelayanan.
- perluasan, pembinaan, dan pelembagaan program.

3. Pengorganisasian.

Sesuai dengan amanah Undang – Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera serta Garis – Garis Besar Haluan Negara tahun 1993, maka terbitlah struktur organisasi yang baru sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 111/HK.010/C4/94 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana nasional di wilayah (daerah).

Didalam Bab IV pasal 102 di sebutkan bahwa BKKBN Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Kantor BKKBN Kabupaten yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor wilayah BKKBN provinsi. Kemudian pada pasal 103 di sebutkan bahwa Kantor BKKBN kabupaten mempunyai tugas melanjutkan dan memantapkan kegiatan Gerakan KB Nasional, menyelenggarakan pengelolaan gerakan pembangunan Keluarga Sejahtera Nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaannya, mengembangkan memantapkan peran masyarakat dan institusi masyarakat serta menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan Kependudukan secara terpadu bersama instansi terkait di wilayah Kabupaten.

Sesuai dengan pasal 105, AKA Tipologi Organisasi Kantor BKKBN Kabupaten Klaten termasuk Kabupaten tipe A, adapun struktur organisasi dan personil untuk kantor BKKBN Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Kantor BKKBN.
- 2) Sub Bagian TU
 - Urusan kepegawaian dan Tenaga Program.
 - Urusan Keuangan dan Sarana.
 - Urusan Surat Menyurat dan Tata laksana.
 - Urusan Rumah dan Protokol.
- 3) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program.
 - Sub Seksi Penyiapan Program dan Anggaran.
 - Sub Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan
 - Sub Seksi Penilaian Program dan Penyebarluasan Infomasi
- 4) Seksi Keluarga Berencana.
 - Sub Seksi Penerangan dan Motivasi.
 - Sub Seksi Pelayanan kontrasepsi.
 - Sub Seksi Peningkatan Institusi Masyarakat.
- 5) Seksi Keluarga Sejahtera.
 - Sub Seksi Ketahanan Fisik Keluarga Berencana
 - Sub Seksi Ketahanan Non Fisik Keluarga Berencana
 - Sub Seksi Operasional Kependudukan.

6) Sub Bagian Supervisi

- Urusan Supervisi Program
- Urusan Supervisi Ketenagaan dan Administrasi
- Urusan Supervisi Keuangan dan Sarana.

7) Pengawas PLKB & PLKB.

4. Hasil program

Pelaksanaan program KB dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai momentum dengan mengacu pada system episode yaitu :

- Episode I (April – Juli)
Tahap konsolidasi dengan pencapaian sasaran 25 %
- Episode II (Agustus – Desember)
Tahap intensifikasi dan ekstensifikasi dengan pencapaian sasaran 90%
- Episode III (Januari – Maret)
Tahap pemantapan dengan pencapaian sasaran 100 %

Berikut adalah beberapa hasil program KB di Kabupaten Klaten :

a. Hasil Program KB Nasional

1) Partisipasi masyarakat dalam pemakaian kontrasepsi.

- Peserta KB baru.

Peserta KB baru yang dilayani dalam kurun waktu 1991 –

2000 rata – rata sudah dapat dilayani 100% atau lebih dari

PPM tahun yang bersngkutan. Pada tahun 2000 dari PPM PB sebesar 28.117 sudah terlayani peserta KB baru sebanyak 30.172 (107,23 %). Sedangkan peserta KB metode kontrsepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD, MOP, dan implant sebanyak 6.388 (20,96%)

- Peserta KB aktif.

Peserta KB aktif dalam kurun waktu 1991 – 2000 yang berhasil dibina dari pasangan usia subur (PUS) sebesar 177.360 adalah sebanyak 154.980 atau 87,38 % dari jumlah PUS yang ada. Adapun peserta KB aktif MKJP dari peserta KB aktif sebanyak 154.980 yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang sebanyak 71.759 peserta atau 16,30 % dari total.

2). Partisipasi masyarakat dalam pembudayaan dan pelebagaan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembudayaan KB bias dilihat dari kepedulian peran serta institusi masyarakat dalam tingkat lini lapangan yng meliputi : PPKBD, sub PPKBD, dan PKB RW serta kelompok Akseptor. Adapun pembudayaan dan pelebagaan tersebut, meliputi :

PPKBD	: 401
Sub PPKBD	: 3315
Kelompok Akseptor	: 8879

b. Hasil Pembangunan Keluarga Sejahtera.

1). Pengembangan Kelompok UPPKS

Upaya kegiatan ekonomi adalah merupakan satu upaya peningkatan pendapatan keluarga melalui kegiatan pembinaan kelompok UPPKS. Adapun kelompok UPPKS di Kabupaten Klaten sebanyak 3.842 kelompok. Dari jumlah tersebut yang aktif kegiatan usahanya sebanyak 3.67 kelompok atau mencapai 95,68 %. Dari jumlah keluarga yang menjadi anggota UPPKS sebanyak 104.808 yang terdiri dari :

- Keluarga pra sejahtera : 39.626 (31,81 %)
- Keluarga Sejahtera I : 24.743 (23,61 %)
- Keluarga sejahtera II & III : 40.439 (44,58 %)

Untuk meningkatkan pendapatan bagi anggota kelompok UPPKS tersebut di berikan pinjaman modal usaha dengan bunga rendah melalui program TAKESRA – KUKESRA dan KPKU. Dan realisasi TAKESRA sampai dengan tahun 2000 berkisar Rp. 125.418.000 atau 82,06 % dari keseluruhan dana sebanyak Rp.151.516.000,00 yang diterimakan untuk 2.966 kelompok. Adapun yang telah memanfaatkan pinjaman modal berupa KUKESRA jumlahnya sekitar Rp. 4.569.029.113,00. Sedangkan yang telah memanfaatkan KPKU telah disalurkan melalui 52 kelompok UPPKS dengan nilai sebesar Rp. 1.537.450.000,00.

2). Kegiatan Kelompok Bina Keluarga.

a) BKB

Jumlah BKB sudah terbentuk sebanyak : 1.481 kelompok. Jumlah ini bila dibandingkan dengan jumlah desa, rata – rata sudah terbentuk 3 hingga 4 kelompok BKB. Dari jumlah kelompok tersebut yang telah aktif melaksanakan kegiatannya sebanyak 1.392 kelompok BKB atau mencapai 93,99 %.

b) BKR

Jumlah kelompok BKR sebanyak 218 kelompok atau mencapai 71,82 % dibandingkan dengan jumlah desa di Kabupaten Klaten, yang berarti belum semua desa terbentuk kelompok BKR. Dari jumlah tersebut yang sudah aktif kegiatannya ada 238 kelompok BKR atau mencapai 82,64 %.

c) BKL

Di Kabupaten Klaten telah terbentuk kelompok BKL sejumlah 289 kelompok atau mencapai 72,07 % dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Klaten, ini berarti bahwa belum semua desa terbentuk kelompok BKL. Dari jumlah kelompok yang telah terbentuk tersebut, yang telah aktif dalam kegiatannya sebanyak 245 kelompok BKL atau mencapai 84,77 %.

Periode Tahun 2001 – 2003

1. Visi dan Misi BKKBN pada Periode ini

a. Visi

Visi Program KB adalah “ Keluarga berkualitas Tahun 2015, yaitu mewujudkan keluarga berkualitas . yaitu suatu keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa “.

b. Misi

Misi pada periode ini antara lain :

- 1) Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil yang berkualitas.
- 2) Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian, pertahanan keluarga dan kualitas keluarga.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
- 4) Meningkatkan upaya promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak – hak reproduksi.
- 5) Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan daalaam mewujudkan kesetaraan daan keadilan gender dalam pelaksanaan program KB Nasional.
- 6) Mempersiapkan pengembangan SDM (sumber daya manusia) potensial sejak pembuahan sampai lanjut usia.

- 7) Menyediakan jasa dan informasi keluarga berbasis keluarga mikro.

2. Tujuan , sasaran dan kebijakan.

a. Tujuan.

Memantapkan kelangsungan program dan kelembagaan serta meningkatkan kinerja program di setiap tingkatan wilayah, untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang bermutu, dalam rangka membantu terwujudnya keluarga berkualitas tahun 2015.

b. Sasaran

- 1) Meningkatkan peserta KB pria.
- 2) Menurunnya pasangan usia subur unmet need.
- 3) Menurunnya alat kontrasepsi hormonal.
- 4) Meningkatnya persalinan aman.
- 5) Meningkatnya keluarga yang tercakup dalam kegiatan pembinaan.
- 6) Meningkatnya anggota UPPKS mendapat kredit dan aktif berusaha.
- 7) Desentralisasi pengelolaan data mikro keluarga.
- 8) Meningkatnya peran swasta dalam program KB dan KS.

c. Kebijakan

Secara spesifik kebijakan program KB Nasional pada periode tahun 2001 sampai dengan 2003 adalah :

- 1) Meningkatkan Kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
- 2) Menyelenggarakan jaminan pelayanan kontrasepsi bagi keluarga miskin
- 3) Meningkatkan Kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi bagi kelompok remaja, priaa daan pasca reproduksi.
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sector swasta.
- 5) Meningkatkan Kualitas keluarga melalui peningkatan peran dan kemandirian organisasi perempuan untuk meninkaatakan kesejahteraan.
- 6) Meningkatkan pembinaan keluargaa dengaan balita, lansia dan keluarga rentan.
- 7) Meningkatkan upaayaa pembinaan yaang di arahkan kepada kesejahteraan daan ketahanan keluarga.
- 8) Meningkatkan prograam advokasi KIE dan pembinaan institusi maasyarakat.

3. Hasil program

Didalaam Garis – Garis Besar Haluan Negara tahun1999 mengamantakan bahwa pelaksanaan era baru Program KB Nasional untuk meningkatkan kualitaas penduduk dilaksanakan melalui pengendalian

kelahiran , memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas program KB. Untuk mencapai hal tersebut dirumuskan melalui empat program pokok yaitu :

- Program Pemberdayaan Keluarga.
- Program Keluarga Berencana.
- Program KRR
- Program Penguatan Kelembagaan dan Jejaring KB.

Dari empat program diatas diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan SDM, seperti di ketahui bahwa permasalahan penduduk di Klaten saat itu cukup kompleks, meski laju pertumbuhan penduduk tahun 2001 sudah cukup rendah yaitu sekitar 0,60 per tahun. Potensi peledakan masih cukup besar yang bisa memicu penduduk menjadi tinggi, karena struktur umur penduduk di Klaten tergolong muda.

Dengan memperhatikan tantangan itu maka dapat di perkirakan bahwa laju pasangan usia subur masih tinggi, disamping itu jumlah penduduk Klaten sebesar 1.265.295 jiwa. Karena itu pengendalian kelahiran yang merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting, dan program KB masih diperlukan sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klaten. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

a. Program Pemberdayaan Keluarga

1) Peningkatan Advokasi dan KIE Pemberdayaan keluarga.

- Publikasi melalui radio RSPD

- Promosi produk unggulan UPPKS

2) Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Peningkatan partisipasi keluarga terutama keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I untuk berperan pada kegiatan pembangunan keluarga sejahtera antara lain kelompok UPPKS dengan kegiatan ekonomi produktif melalui Takukesra dan KPPU.

1) Takukesra

- Tahun 2001 anggota UPPKS = 100.445 dan yang mendapat Takesra 44.074 Keluarga, sedangkan yang memanfaatkan Kukesra sebanyak 32.886 keluarga.

b. Program KB .

Dalam upaya peningkatan kualitas penduduk, maka keberhasilan program KB sangat diperlukan dengan kegiatan antara lain :

- 1) Advokasi KIE KB melalui radio, melalui konseling wawannya di PKR dan tempat – tempat pelayanan KB, melalui penyuluhan KB pada pertemuan paguyuban KB.
- 2) Jaminan dan pelayanan KB .
 - pelayanan konseling agar konsumen puas dan mantap dalam pemakaian KB sehingga terjaga kelangsungannya.

- Ayoman medis dan ayoman pencabutan implan khususnya bagi keluarga miskin.
- Pelayanan KB keliling untuk kesinambungan program dan pembinaan peserta KB.

3) Partisipasi pria .

Kegiatan yang dilakukan dengan pengembangan materi KIE dan Advokasi bagi peran pria dalam rumah tangga.

c. Program KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)

Program Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan program yang relative baru sehingga kegiatan baru dalam tahap sosialisasi. Adapun pembentukan wadah dan KIE (komunikasi, edukasi dan informasi) antara lain :

- Pembentukan Pusat Konsultasi Remaja.

Guna mewadai kegiatan bagi remaja, khususnya dalam kegiatan konseling bagi remaja tentang kegiatan reproduksi, maka pada tanggal 19 juli 2001 dibentuk Pusat Konsultasi Remaja dengan nama Bina Remaja Rejahtera (BRS). Karena suatu hal BRS tidak beroperasi, maka pada tahun 2002 melebur menjadi Bina Remaja Sebaya yang dipusatkan di PMI Kabupaten Klaten, dengan kegiatan menampung konsultasi dari berbagai kalangan remaja yang mempunyai permasalahan remaja, diantaranya adalah KRR.

- Advokasi KIE (komunikasi, edukasi dan informasi)

Advokasi KIE dilakukan agar kegiatan KRR memperoleh dukungan dari para pemimpin dinas ataupun instansi terkait, para tokoh masyarakat, tokoh agamaserta LSOM, sehingga KRR akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. KIE dalam rangka KRR dilakukan dengan cara :

1. Radio Spot dengan media tradisional, siaran pedesaan dan dialog interaktif di :
 - Radio Candi Sewu : 2 bulan sekali
 - Radio swadesi delanggu : 2 bulan sekali
 - Radio Salma RSI Klaten : 2 bulan sekali
 - RWK Klaten : 2 bulan sekali
 - RSPD Klaten : 1 bulan sekali
 2. KIE melalui Pondok pesantren Sendang Sinangka Ceper, tanggapan yang diterima positif, baik dari kalangan pengurus, perwakilan warga dan perangkat desa serta tokoh agama dan masyarakat setempat.
 3. KIE kepada Kelompok dan Bina Keluarga Remaja.
 4. Penyebarluasan hand out KRR.
- d. Program peningkatan kelembagaan dan jejaring KB.

Peningkatan kegiatan operasional agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu didukung dengan kelembagan yang mantap, diantaranya dengan :

- 1) Advokasi dan KIE melalui spanduk Harganas, publikasi Kesatuan gerak PKK-KB-Kes, pertemuan penggalangan.
- 2) Kesepakatan melalui diskusi antara semua karyawan- karyawan BKKBN dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Klaten.
- 3) Peningkatan peran institusi masyarakat, Bhakti Bhayangkara KB-Kes dan TNI Mannggal KB-Kes, TMKK, Kesatuan gerak PKK KB- Kes, mengikuti jambore institusi masyarakat.

Adapun peningkatan institusional antara lain :

1) Institusi Masyarakat Pedesaan.

Institusi masyarakat pedesaan dalam program KB meliputi PPKBD, sub PPKBD, dan kelompok KB. Berikut adalah rinciannya :

- Jumlah PPKBD se kabupaten Klaten sebanyak 401 sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada di kabupaten klaten.
- Sub PPKBD : 3542 (belum tentu setiap Rw ada Sub PPKBD)
- Kelompok KB (PKB RT) : 9.048. hamper setiap RT ada kelompok KB.

2) Peningkatan Institusi dan Peran serta Pemberdayaan LSOM.

- Bekerjasama dengan LPKM Bina Swadaya, pembinaan kelompok UPKKS untuk mendapatkan modal dari

Kukesra Mandiri di Bayat, Wedi, Klaten selatan dan jatinom.

- Dengan PKK melalui Kesatuan gerak PKK KB- kes sampai ke pelosok desa yang hasilnya cukup membantu perolehan PB.
- Bekerjasama dengan IWAPI, LPKM Bi9na Swadaya< Persepsi dan lain – lain , membentuk kepengurusan AKU di tingkat kabupaten.
- Melalui TMD di Gantiwarno, TMDD sengkuyung di Klaten Selatan, dan TMKK dijatinom serta seluruh Koramil yang ada di Kabupaten Klaten dengan pelayanan KB gratis.
- Melaksanakan Bhakti Bayangkara baik di tingkat Polse maupun Polres.
- PKBI cabang Klaten memperoleh penghargaan Mandala Karya Kencana yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 16 Agustus 2002 atas jasa dan komitmennya dalam memberikan pelayanan program KB di Kabupaten Klaten.

C. Gambaran umum Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Klaten terletak di Jln. Ronggowarsito, Kecamatan Klaten Utara dan mempunyai nomer telephone kantor

yaitu ; (0272) 321501. Kantor Keluarga Berencana merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2003 dimana di dalam Perda tersebut berisi mengenai Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Kantor Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten. Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor KB Kabupten Klaten antara lain:

- **Kedudukan Kantor KB Kabupaten Klaten**

- 1) berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten Klaten di bidang keluarga berencana.
- 2) Dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintah kabupten dalam bidang keluarga berencana.

- **Tugas dan fungsi Kantor KB Kabupaten Klaten**

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana.
- 2) Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemritah Kabupaten di bidang keluarga berencana.
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati di bidang keluarga berencana.

Adapun Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Klaten berdasarkan Perda No. 18 Tahun 2003 Bab IV pasal 6, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha

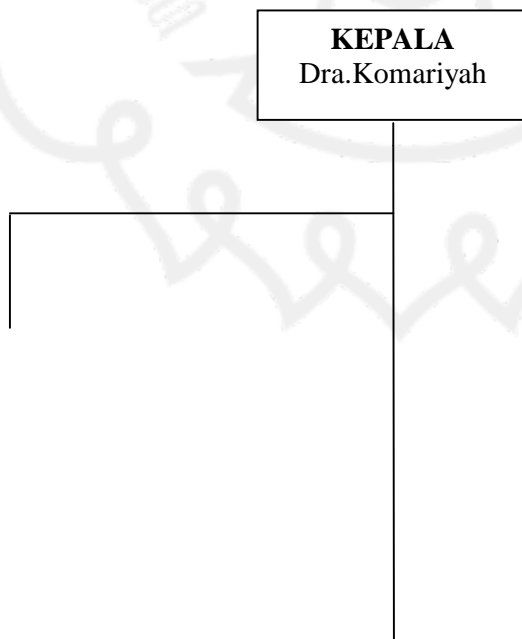
- c. Seksi Pendataan
- d. Seksi Pelayanan
- e. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

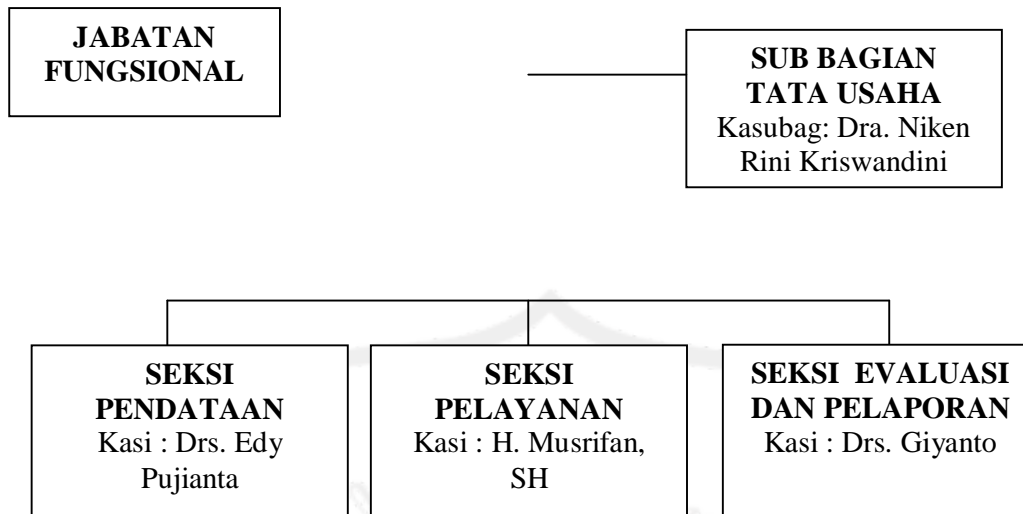
Jumlah pegawai Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Klaten per 2008

adalah sebagai berikut :

Jumlah pegawai kantor	: 38 pegawai, terdiri dari;
- Golongan IV	: 2 pegawai
- Golongan III	: 32 pegawai
- Golongan II	: 3 Pegawai
- Golongan I	: 1 Pegawai

Berikut diagram dari susunan organisasi Kantor keluarga berencana Kabupaten Klaten :





Gambar 2.1 : Bagan Organisasi Kantor Keluarga Berencana Kabupaten klaten.

Berikut adalah penjabaran dari masing – masing jabatan dalam Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Klaten yang tercantum dalam Keputusan Bupati Klaten Nomor 1572 Tahun 2003 , antara lain :

1) **Kepala Kantor.**

Kepala Kantor Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pengelolaan dan pengendalian program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera. Secara lebih detail penjabaran tugas Kepala Kantor adalah sebagai berikut :

- a). Menghimpun dan mempelajari Peraturan perundang – undangan di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera,

- b). Menyusun rencana program, pedoman dan petunjuk teknis sistem administrasi dan pelayanan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera,
- c). Melaksanakan pelayanan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera,
- d). Melaksanakan pendistribusian sarana dan prasarana pelayanan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera,
- e). Melaksanakan sinkronisasi, pembinaan dan pemantauan pelayanan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera,
- f). Melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan serta penyebrluasan informasi data keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera,
- g). Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera serta menyiapkan bahan petunjuk teknis pemecahannya,
- h). Melaksanakan tugas lain yang dibrikan Bupati di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.

2) **Sub Bagian Tata Usaha.**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kator keluarga berencana di bidang ketatausahaan. Secara lebih detail penjabaran tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a). Menghimpun, mempelajari Pereturan Perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang tata usaha,

- b). Menyusun rencana program, pedoman dan petunjuk teknis di bidang umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian,
- c). Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga kantor, personil, material dan finansial,
- d). Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan,
- e). Melaksanakan inventarisasi pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor,
- f). Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pemecahan masalah,
- g). Memberikan pelayanan administrasi,
- h). Melaksanakan kegiatan surat – menyurat,
- i). Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala kantor sesuai dengan bidangnya.

3). **Seksi Pendataan.**

Seksi Pendataan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kantor keluarga berencana di bidang pendataan. Secara lebih detail penjabaran tugas seksi pendataan adalah sebagai berikut :

- a). Menghimpun, mempelajari Pereturan Perundang – undangan, kebijakan umum di bidang pendataan penyebarluasan informasi, dokumentasi, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera,

- b). Menyusun rencana program, pedoman dan petunjuk teknis sistem administrasi dan pengelolaan data keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera,
- c). Melaksanakan pencatatan, pengelolaan dan penyebarluasan informasi data keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- d). Melakukan pemeliharaan dan penyimpanan data keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- e). Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- f). Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pendataan, penyebarluasan informasi dan dokumentasi serta menyiapkan bahan petunjuk teknis pemecahan masalah,
- g). Melaksanakan pendistribusian sarana dan prasarana pendataan pada petugas tingkat kecamatan,
- h). Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan, administrasi di bidang pendataan, penyebarluasan informasi, dan dokumentasi,
- i). Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala kantor sesuai dengan bidangnya.

4) **Seksi Pelayanan**

Seksi pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kantor keluarga berencana di bidang pelayanan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Secara lebih detail penjabaran tugas seksi pelayanan adalah sebagai berikut :

- a). Menghimpun, mempelajari Pereturan Perundang – undangan, kebijakan umum di bidang pelayanan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- b). Menyusun rencana dan pengembangan program, pedoman dan petunjuk teknis pelayanan, program keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- c). Melakukan pelayanan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di luar tindakan medis,
- d). Melaksanakan pendistribusian sarana dan prasarana pelayanan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada petugas tingkat kecamatan,
- e). Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan, administrasi di bidang pelayanan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- f). Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pelayanan dan menyusun petunjuk penyelesaiannya,
- g). Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala kantor sesuai dengan bidangnya.

5) **Seksi Evaluasi dan Pelaporan**

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kantor keluarga berencana di bidang evaluasi dan pelaporan. Secara lebih detail penjabaran tugas seksi evaluasi dan pelaporan adalah sebagai berikut :

- a). Menghimpun, mempelajari Pereturan Perundang – undangan, kebijakan umum di bidang evaluasi dan pelaporan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera,

- b). Menyusun rencana dan pengembangan program, pedoman dan petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan, program keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- c). Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- d). Menginventarisasi permasalahan dan menyusun petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- e). Melaksanakan pendistribusian sarana dan prasarana evaluasi dan pelaporan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada petugas tingkat kecamatan,
- f). Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala kantor sesuai dengan bidangnya.

6) **Kelompok Jabatan Fungsional**

Terdiri dari empat unsur antara lain :

-) Jabatan Fungsional Keahlian

Adalah jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana ahli yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, peningkatan, penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

-) Jabatan Fungsional Keterampilan

Adalah jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana terampil yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang dan terikat etika profesinya.

-) Tenaga profesional

Berkedudukan di seluruh Tingkat Kecamatan yang di koordinir oleh koordinator lapangan yang semuanya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

-) Koordinator Lapangan

Mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan operasional pelayanan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera instansi pemerintah, swasta dan masyarakat di wilayah kecamatan.

Adapun penjabaran tugas dari jabatan fungsional antara lain adalah sebagai berikut :

- a). Menyusun rencana kerja dan bidang tugas dan fungsinya,
- b). Melaksanakan tugas sesuai bidang keahlian atau keterampilannya,
- c). Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait,
- d). Membuat laporan pelaksanaan tugas,
- e). Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala kantor sesuai dengan bidangnya.

Untuk mendukung suksesnya program Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten, terdapat juga klinik dan petugas klinik KB (KKB) yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten klaten yang dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.1. : Banyaknya klinik KB dan Petugas KB menurut kategori petugas periode semester II tahun 2006.

NO	KECAMATAN	KKB	KATEGORI PETUGAS					JML
			POS YANDU	DOKTER	BIDAN	PEMBANTU BIDAN	TNG ADM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Klaten Selatan	4	69	8	13	-	4	94
2	Klaten Tengah	1	58	50	6	-	1	115
3	Klaten Utara	1	43	45	4	-	1	93
4	Wedi	4	88	9	13	-	4	114
5	Kebonarum	2	43	4	7	-	2	56
6	Ngawen	4	63	6	8	-	4	81
7	Kalikotes	3	67	5	8	-	3	83
8	Jogonalan	4	97	6	17	-	4	124
9	Gantiwarno	4	93	3	10	-	4	110
10	Prambanan	4	64	11	17	-	4	96
11	Manisrenggo	5	82	3	15	-	5	105
12	Kemalang	4	65	3	9	-	4	81
13	Karangnongko	4	79	5	10	-	4	98
14	Jatinom	6	93	8	16	-	6	123
15	Karanganom	6	96	2	9	-	6	113
16	Tulung	6	95	4	13	-	6	118
17	Polanharjo	5	93	3	9	-	5	110
18	Pedan	5	68	9	17	-	5	99
19	Karangdowo	4	91	3	13	-	4	111
20	Cawas	6	114	5	26	-	6	151
21	Trucuk	6	102		23	-	6	138
22	Bayat	6	96	3	18	-	6	123
23	Delanggu	3	85	17	14	-	3	119
24	Ceper	6	48	16	14	-	6	84
25	Juwiring	4	95	3	17	-	4	119
26	Wonosari	8	92	7	12	-	8	119
	Jumlah	115	3.079	45	38	-		2.777

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Perubahan – perubahan dari BKKBN menjadi KKB Kabupaten Klaten.

Kantor Keluarga berencana (KKB) merupakan kantor yang dahulunya adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau disingkat (BKKBN). kantor ini mengalami perubahan seiring dengan bergulirnya otonomi di negara indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 18 Tahun 2003 tertanggal 20 November 2003 bahwa bentuk Kelembagaan BKKBN berubah menjadi Kantor Keluarga Berencana (KKB) Kabupaten Klaten. Dengan demikian secara resmi BKKBN Kabupaten Klaten telah berubah menjadi KKB Kabupaten Klaten tertanggal mulai 20 November 2003.

Sebagai sebuah organisasi baru, KKB saat ini sedang menata diri karena banyak sekali perubahan yang di alami pasca otonomi daerah. Perubahan ini terjadi diberbagai segi, baik secara struktural keorganisasian, pendanaan,

maupun kegiatannya. Pada bab ini akan di bahas mengenai berbagai bentuk perubahan yang terjadi di KKB.

Perubahan dapat terjadi, mungkin disebabkan adanya identifikasi peluang yang akan dimanfaatkan manajemen. Namun lebih sering itu berupa antisipasi dari atau reaksi atas suatu masalah. Peluang dan masalah tersebut bisa ada dalam organisasi tersebut, diluar organisasi, atau diluar dan didalam organisasi tersebut.(pendapat robbins dalam Jusuf Udayana, 1994 ; 420).

Secara legal operasional KKB Kabupaten Klaten mulai terbentuk pada 20 November tahun 2003 dengan diterbitkannya peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor : 18 tahun 2003 yang memuat tentang terbentuknya kelembagaan Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Klaten. Hal ini juga sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor : 103 tahun 2001 yang menyatakan bahwa BKKBN merupakan salah satu instansi pemerintah yang harus menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah dimana didalam penyerahan kewenangannya dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 dengan pertimbangan sesuai dengan kebutuhn dan kemampuan daerah dan tetap memberikan prioritas bagi kelangsungan program.

Beberapa perubahan yang terjadi ketika BKKBN menjadi KKB Kabupaten Klaten :

1. Perubahan Bentuk Oraganisasi.

Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2003 tentang pedoman oerorganisasi perangkat daerah. Dalam Bab IV pasal 16 pada ayat 3 dan 4 mengenai perangkat daerah kabupaten /kota

dapat dilihat perbedaan bentuk organisasi badan dan kantor yaitu sebagai berikut :

- Bab IV pasal 16 bagian kedua ayat 3 menyebutkan bahwa Badan terdiri dari 1 (satu) bagian tata usaha dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bidang. Bagian tata usaha terdiri sebanyak-banyaknya 2 (dua) sub bagian, dan bidang terdiri sebanyak-banyaknya 2 (dua) sub bidang.
- Bab IV pasal 16 bagian kedua ayat 4 menyebutkan bahwa kantor terdiri dari 1 (satu) sekretariat, sebanyak-banyaknya 5 (lima) seksi dan kelompok jabatan fungsional.

Secara jelas dari yang tersebut diatas antara badan dan kantor mempunyai bentuk organisasi yang berbeda cakupan dan kewenangan. Secara sepintas badan mempunyai cakupan yang lebih luas daripada kantor dari segi pengembangan struktur organisasi.

Menurut keterangan dari bapak Rafal selaku KepalaPemberdayaanPerempuan Kantor KB KabupatenKlaten menuturkan sebagai berikut :

“secara struktural memang jelas berubah mas, karena dapat kita lihat secara jelas di bentuk struktur organisasi KKB. Ada beberapa urusan dinas yang digabung sehingga kegiatannya menjadi banyak.”

Sementara itu dari penuturan ibu Niken bagian tata usaha KKB KabupatenKlaten juga mengemukakan hal yang sama terkait dengan perubahan struktur yang dialami oleh kantor KKB Kab. Klaten. Berikut penjelasan beliau :

“kalau dahulu BKKBN sifatnya sebagai instansi vertikal yaitu masih merupakan kepanjangan dari kantor BKKBN, tetapi sekarang kan menjadi KKB yang ini merupakan bagian dari SOT pemerintah Kab. Klaten yang nanti nya akan menjadi kantor PP dan KB . Jadi secara hubungan relasi saat ini kita lebih condong pada pemerintah kabupaten.”

Dari penyampaian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan yang terjadi di kantor KKB membawa pengaruh terhadap bentuk maupun struktur organisasi KKB.

2. Perubahan Pembiayaan/Pendanaan Operasional Organisasi.

Dengan bergulirnya Otonomi Daerah memungkinkan daerah untuk dapat mengelola kelembagaan di daerahnya sendiri yang tanggungjawab dan wewenang sebagian besar dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini pun berlaku untuk BKKBN yang penyelenggaraannya di serahkan kepada pemerintah daerah masing-masing menurut kemampuan masing-masing daerah dalam pengelolaannya. Hal ini juga dapat diartikan bahwa faktor pembiayaan operasional lembaga maupun organisasi kenegaraan dilimpahkan kepada daerah dalam menanggung biaya operasional organisasi. Dengan kuota yang berbeda dari selama BKKBN dan KKB Kabupaten Klaten.

Berikut adalah gambaran umum alokasi biaya operasional sewaktu masih menjadi BKKBN, pendanaan sebagian besar berasal dari APBN yang mencapai 75% dari total pembiayaan atau sekitar Rp. 353.185.375.00 dan yang berasal dari APBD mencapai 25 % dari jumlah total pada tahun 2001. Sedangkan setelah menjadi KKB Kabupaten Klaten anggaran tahun 2008

dari APBN hanyasekitar 42 % atausekitarRp. 803.923.550,00 dari total pembiayaan, sedangkansisanyasekitar 48 % didanaidari APBD KabupatenKlaten. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pendanaan operasional berubah dari semula dana sebagian besar dari APBN (sewaktu menjadi BKKBN) menjadi dominan lebih besar APBD (setelah menjadi KKB).

Menurut penuturan dari Ibu Niken beliau menjelaskan bahwa perubahan ini juga membawa perubahan dalam hal alokasi pembiayaan dan sumber pembiayaan kegiatan/ program KKB. Berikut penjelasannya :

“waktu masih BKKBN pendanaan didukung oleh APBN dan sedikit ditunjang oleh dana APBD kabupaten klaten. Sedangkan sekarang dibalik mas, yang tadinya dari APBN mendapat jatah besar sekarang malah diperkecil alokasinya, sementara untuk APBD menjadi sumber utama pendanaan jumlahnya diperbesar sedangkan dana dari APBN di perkecil dan sifatnya hanya dana sandingan.”

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan bentuk BKKBN menjadi KKB ini juga membawa pengaruh pada sumber pendanaan, dan juga besarnya alokasi pendanaan yang berbeda. Pada saat masih menjadi BKKBN pendanaan secara utama di topang oleh APBN sementara setelah menjadi KKB pendanaan ditopang oleh APBD kab. Klaten.

3. Pengorganisasian

Padaperiodeini pelaksanaan KB di KabupatenKlatenmengalamibabakbaru, yaituperubahankelembagaan.Dalampelaksanaannyasemuapegawaaai BKKBN Klatenditatakembalioleh pemerintahKabupatenKlaten.BKKBN KabupatenKlatentelahberubahmenjadi KKB KabupatenKlaten.PadabulanMaret 2004 Kepala Kantor KB KabupatenKlatenyakni Drs. Mudjijonomemaswukimasapurnatugas yang kemu7dian digantikanolehMusrifan, SH yang kemudian di gantikanolehDra. Komariyahsampaidengansekarang.

Untukmenata Kantor KB KabupatenKlatenMakapadabulanAgustusTahun 2004 tentangpemberhentianpejabatstrutural, pejabatfungsionaldanpenempataneks. Pegawai BKKBN pada unit kerja di lingkunganpemerintahKabupatenKlatenyakni :

- 4 orang :menjadipejabatstrutural di Lingkungan Kantor KB Kabupatenklaten.
- 43 orang :Stafkantor KB KabupatenKlaten.
- 34orang:Penyuluh KB di PPKKS tersebar di KabupatenKlaten.
- 68orang : Staf PPKKS (Pegawai DKKSSekarangstatusnya) tersebar di kabupatenKlaten.
- 378 orang :Staf di Kecamatan-kecamatantersebar di KabupatenKlaten.

MenurutpenjelasandariibuNikenbeliaumenjelaskanbahawaperubahanstruktu

rkepegawaianinimerupakankonsekuensi dariperubahan bentuk organisasi KKB. Semula pegawai yang status kepegawaiannyamasukdalamstrukturkepegawaian BKKBN statusnyadirubahdanditarikmenjadipegawaiDinasKesehatandanKesejahteraan Sosial, halinidilakukanuntukmengatasialokasipembiayaan/penggajiandanperampinganstrukturpegawaisertaefektivitasdaefisiensikinerjapegawaidalammelaksanakan program KB di KabupatenKlaten.

BerikutKutipanwawancaradenganibuNiken :

“pascaperubahan status BKKBN menjadi KKB secara structural memangberubah total mas. Inidimaksudkanuntukkefektifanorganisasidan agar organisasi KKB tidakgemuklagikarenajikapegawaiyang tersebar di lapangan tetap dipertahankanakan membebani keuangan KKB.”

IbuKomariyahselakuKepala KKB yang baru menambahkan :

“sebetulnya kami masih sangat membutuhkan tenaga di lapangan yang banyak mas untuk menunjang pelaksanaan program kami. Tenaga tersebut dapat kita perintahkan secara langsung dan harus menunggukonfirmasi dari dinas lain. Akan tetapi karena permasalahan keefektifan pendanaan kami yaterpaksa kami pasrah saja. Karena secara aturan KKB yang berbentuk kantor tidak boleh memiliki pegawai yang jumlahnya sangat banyak, hal ini dikarenakan akan sangat memberatkan keuangan KKB.”

4. Kepegawaian

Dengan berdasarkan surat Keputusan Bupati Klaten No. 821.2/46/12/2004 dimaksudkan karyawan/karyawati Kantor KB Kabupaten Klaten terdiri dari 47 orang (4 orang pejabat struktural dan 43 orang staf Kantor KB). Sedangkan 34 orang penyuluh KB kepegawaian mengikuti DKKS Kabupaten Klaten . Pada bulan April 2005

tepatnyapadatanggal 16 April 2005 denganSuratKeputusanBupatiKlaten No. 81.12/673/12 tertanggal 16 April telahdilanditanditetapkanKepala Kantor KB KlatenadalahDra. Komariyah.

Adapunsampidengan November 2006 jumlahpegawai Kantor KB kabupatenklatenadalah 45 orang (3 orang masukkeunitkerja yang lain) ditambah 2 tenagakontrak. Sedangkanpenyuluh KB meskipunsecarakepegawaianikut DKKS Kabuptenklaten, namunsecaraprogramatimasihadahubungandengan Kantor KB KabupatenKlatenmakasetiapkegiatanmasihselaludilibatkan.

Perubahan ini membawa susunan pegawai penyuluh KB di lapangan. Dari 34 Penyuluh KB yang ada, saatininggal 28 penyuluh KB (4mutasike unit kerja lain dan 2 orang purnatugas). Dan berikutadalahJumlahpegawai Kantor KeluargaBerencanaKabupatenKlaten per 2008 sebagaiberikut :

- Jumlahpegawaikantor : 38 pegawai, terdiridari;
- Golongan IV : 2 pegawai
 - Golongan III : 32 pegawai
 - Golongan II : 3 Pegawai
 - Golongan I : 1 Pegawai

Dari uraiandiatas Nampak bahwapegawaipada KKB mengalamiperombakanterutamapenguranganjumlahpegawai yang cukupbesar.Banyakpegawai yang merupakanpegawailapangansekarang di pindahstatusnyamenjadipegawaidinaskesehatandikarenakanadanyaperubah an status BKKBN menjadi KKB. Menurutkepala KKB

Kabupaten Klaten beliau menjelaskan bahwa perubahan ini mengikuti perubahan keorganisasian, kalau pegawai lapangan masih diikutsertakan pada kantor KKB maka akan sangat membebani finansial kantor. Hal ini mengingatkan bahwa pendanaan KKB mengalami perubahan. Kalau dahulu ada dana APBN yang menggaji mereka sekarang tidak lagi karena status kepegawaiannya sudah menjadi pegawai daerah setelah terjadi perubahan ini.

Pegawai yang beradal di lapangan sekarang statusnya menjadi pegawai di naskah kesehatan ketapi jika suatu saat KKB membutuhkan bantuan tenaga operasional maka mereka masih dapat dibantu kan. Hanya saja sekarang untuk menggerakkan mereka tidak semudah seperti dahulu lagi karena KKB harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kepala di naskah kesehatan selaku atasan mereka.

5. Hasil Program

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan maka Kantor KB Kabupaten Klaten telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Program pemberdayaan keluarga.
 - 1). Pemberdayaan ekonomi keluarga
 - 2). Peningkatan Ketahanan Keluarga
- b. Program KB dan Kesehatan Reproduksi

- 1) pencapaian peserta KB baru :
- 2) Pencapaian peserta KB baru pria :
- 3) Peserta KB aktif :
- 4) Peserta KB aktif MKJP :
- 5) Peserta KB aktif pria :
- 6) Peserta KB mandiri (menggunakan pelayanan klinik swasta)
- 7) Peserta KB drop out (DO) :

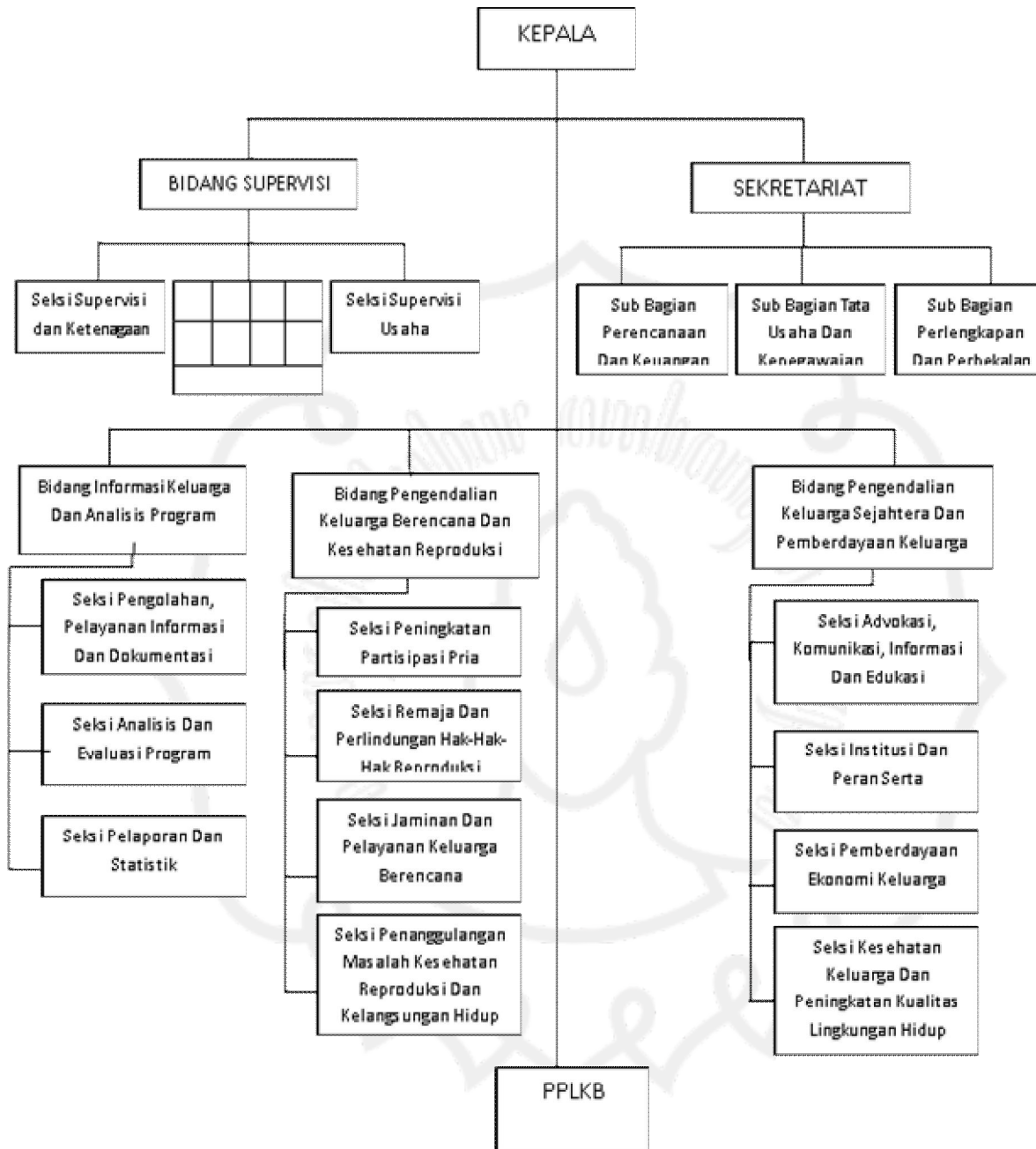
c. Program Pemberdayaan Perempuan

E. Evaluasi perubahan dari BKKBN menjadi KKB Kabupaten Klaten.

1. Keorganisasian

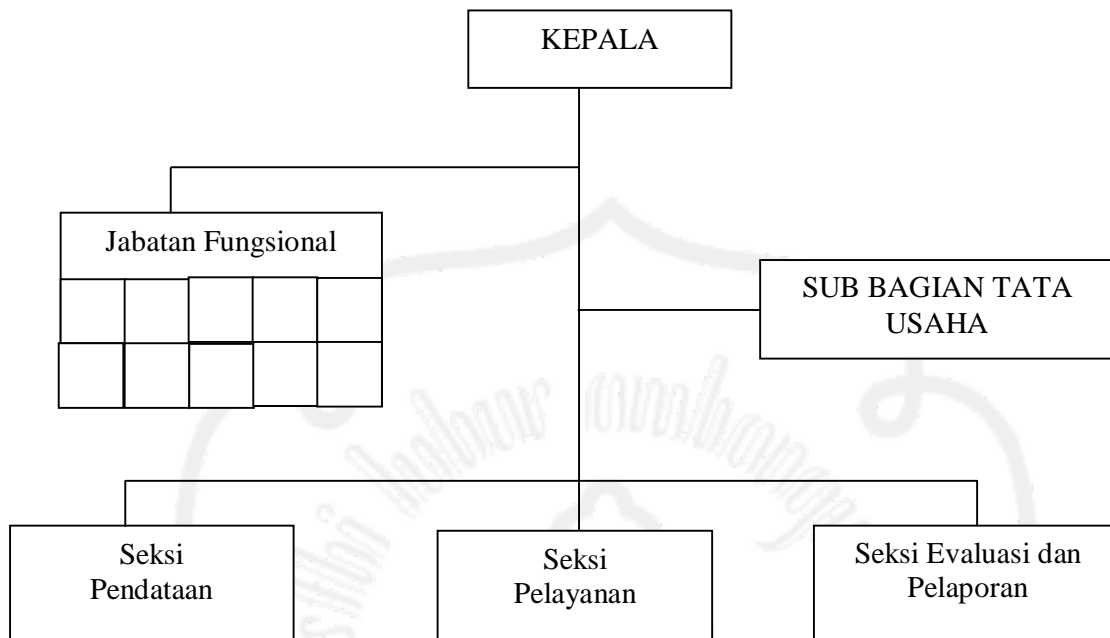
Perubahan yang terjadi dari BKKBN menjadi KKB senantiasa membawa dampak baik secara fisik maupun secara fungsi. Secara fisik perubahan organisasi BKKBN menjadi KKB dapat diamati dari perubahan struktur organisasinya. Bentuk struktur organisasi yang rumit dan panjang serta pembagian kerja yang menyeluruh di masing-masing bagian berubah menjadi struktur baru yang lebih simpel dan sederhana terlihat dalam perubahan organisasi KKB Kabupaten Klaten. Berikut perbedaan struktur organisasi sebelum dan sesudah terjadi perubahan :

Struktur organisasi BKKBN Kab. Klaten :



Sumber : Arsip BKKBN Kab. Klaten

Gambar 3.2. Bagan struktur organisasi BKKBN setelah berubah menjadi KKB.



Sumber : Arsip KKB Kab. Klaten

Dari kedua struktur di atas dapat diketahui bahwa perubahan yang terjadi pada BKKBN menjadi KKB merupakan perampingan struktur lama (BKKBN). Secara tugas pokok dan fungsi juga mengalami perubahan seiring dengan perubahan struktur, dimana KKB sekarang lebih intensif pada program-program monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dicapai pada waktu masih BKKBN.

2. Keuangan

Dari segi pendanaan KKB mengalami perubahan struktur pendanaan yang merupakan akibat dari adanya perubahan dari

BKKBN. Perubahan ini menyangkut sumber dana yang diperoleh KKB. Pada saat masih berbentuk BKKBN komposisi dana untuk kegiatan masih bersumber dari APBN sebagai sumber pendanaan yang utama dan didukung dengan APBD Kabupaten Klaten yang menjadi pelengkap anggaran kegiatan. Setelah berubah menjadi KKB sumber pendanaan persentasenya berubah, yang semula berasal dari APBN dan merupakan sumber utama sekarang dibalik menjadi APBD sebagai sumber utama pendanaan sedangkan dari APBN menjadi sumber pelengkap atau hanya bersifat sebagai tambahan.

3. Kepegawaian

Perubahan BKKBN menjadi KKB juga berdampak pada restrukturisasi dan reposisi pegawai yang pada saat itu menimbulkan pro dan kontra karena banyak pegawai yang tidak mengetahui apa tugas yang akan dilaksanakan dengan struktur yang baru. Kebingungan sempat terjadi di antara para pegawai karena mereka belum paham dengan Tupoksi mereka yang baru, sebab mereka merasa diombang-ambing dengan keputusan bupati pada saat itu. Berikut menurut penuturan kepala Sub Bagian Tata Usaha KKB kab klaten :

“..saat ini kita sedang berbenah untuk menindaklanjuti keputusan bupati yang mengubah BKKBN menjadi KKB mas, kami dan para staff masih rancu dengan tugas dan fungsi kita yang baru. Kita juga harus mengganti program-program yang baru sesuai dengan bentuk struktur yang baru. Kami merasa bahwa BKKBN sebetulnya tidak perlu diubah menjadi KKB karena secara struktural lebih tepat dan kita bisa leluasa menjalankan tugas dan memaksimalkan program/ kegiatan yang sudah ada. Kita tidak direpotkan lagi dengan persoalan-persoalan administratif dan teknis lagi.”

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha, staf Seksi Evaluasi dan Pelaporan yang menjelaskan bahwa setelah perubahan banyak pegawai yang berpindah posisi/ jabatan, sekaligus tanggung jawab yang baru. Ada yang berpindah dari patugas penyuluh KB dilapangan menjadi staf tata usaha dan sebaliknya. Beban kerja yang diemban juga berubah serta bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan berubah sesuai dengan posisi mereka yang baru, yang hal ini mengakibatkan kegiatan KKB sempat terganggu untuk beberapa waktu.

Sementara itu menurut salah satu staff KB di kecamatan menjelaskan bahwa mereka yang di lapangan hanya tunduk dan patuh menerima apa yang akan diperintahkan dari KKB meskipun secara kegiatan mereka merasa masih harus beradaptasi tugas yang baru dan baru dapat bekerja dengan adanya ijin pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini adalah DKKS (Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial). Menurut mereka hal ini bukan saja berakibat pada bentuk kegiatan yang baru dan belum dapat mereka laksanakan secara penuh, tetapi juga karena petugas lapangan secara teoritis dan secara struktural berada di bawah DKKS yang membuat pekerjaan tidak bisa dilakukan secara langsung dan membutuhkan koordinasi terlebih dahulu. Berikut kutipan wawancara dengan Staff KB di tingkat kecamatan :

“...kita hanya menjalankan perintah dari kantor KB di kabupaten selaku koordinator pelaksanaan program KB. Ada hal-hal yang baru yang di programkan dari KKB kab klaten seiring dengan perubahan bentuk organisasi KB mas. Misalnya saja kita memberikan talkshow kepada remaja, sosialisasi di sekolah-sekolah dan di jalan-jalan yang ramai seperti di jalan pemuda. Sebetulnya kegiatan-kegiatan ini hanya merupakan perluasan dari program lama, misalnya kalo dulu sosialisasi hanya dilaksanakan di desa-desa dan kelurahan sekarang ditambah di jalan dan sekolahan. Tetapi kendalanya adalah

masih belum cukupnya petugas di lapangan sehingga masih belum secara menyeluruh dapat dilaksanakan karena berkurangnya jumlah petugas lapangan ”

Konsekuensi logis yang harus ditanggung akibat perubahan struktur dan bentuk organisasi KB di kabupaten klaten merupakan sebuah terobosan baru guna memberikan nuansa baru di tubuh organisasi KB serta untuk memaksimalkan peran dan fungsi kantor KB. BKKBN harus dirubah menjadi KKB dengan tujuan mekanisme kegiatan yang dijalankan lebih terarah dan cepat, karena secara hierarkis pemerintah kabupaten dapat langsung berperan dalam mengawasi dan menggerakkan serta memberikan suntikan dana yang lebih besar dalam penyelenggaraan kegiatan KKB.

Berikut menurut penuturan Kasi Pelayanan Kantor KKB klaten :

“..secara sruktur KKB sekarang mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah kabupaten mas, hal ini dapat kita rasakan dari pemberian alokasi dana dari pemkab untuk penyelenggaraan kegiatan KB di klaten yang lebih besar dari pada Pemerintah Pusat. Namun yang masih menjadi kendala bagi kami dan rekan-rekan adalah belum tertata rapinya program dan kegiatan KKB karena masih dalam tahapan pilot project. Saat ini program yang kita jalankan masih mengacu program-program yang dulu. Dan untuk kedepannya pihak KKB sendiri mengajukan diri untuk bisa menjadi Dinas supaya lebih memudahkan kerja kedepannya, kita cuma menunggu kepastian dari Pemda dan DPRD Klaten saja. ”

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam peerubahan BKKBN menjadi KKB merupakan sebuah agenda reformasi birokrasi yang dilakukan seiring bergulirnya otonomi daerah. Namun, perhatian penuh terhadap kantor KKB belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah karena dalam perubahan ini pada dasarnya hanya merupakan sebagai agenda ikut-ikutan dan bukan karena kebutuhan.

4. Program/ Kegiatan

Perubahan yang terjadi pada KKB dapat diketahui dari terbentuknya program baru yang dahulu bukan menjadi bagian dari program BKKBN. Program tersebut misalnya program pemberdayaan perempuan yang mana program inilah setelah adanya perubahan BKKBN menjadi KKB.

Program-program yang dijalankan oleh KKB juga berbeda dengan BKKBN. Perubahan ini membawa bentuk kegiatan baru yang dijalankan oleh KKB saat ini beberapa program baru yang dijalankan oleh KKB adalah Program Pemberdayaan Perempuan (PP). Berikut menurut penjelasan bapak Rafael :

“setelah menjadi KKB kita ada program baru yaitu program Pemberdayaan Perempuan (PP) yang dahulunya ditangani oleh bagian kesejahteraan sosial.” (wawancara, Juni 2009)

Sementara itu menurut kepala seksi evaluasi dan pelaporan, beliau menambahkan :

“ memang kita tidak merubah setiap kegiatan yang sudah ada di KKB mas sebelum dan sesudah perubahan. Namun, ada beberapa program yang baru dan menjadi kewenangan kami yaitu program Pemberdayaan perempuan. Karena program ini terkait langsung dengan masalah KB.”

F. Kendala yang dihadapi dalam menjalankan roda organisasi BKKBN setelah menjadi KKB.

Perubahan BKKBN menjadi KKB membawa perubahan yang mendasar pada pelaksanaan dan terselenggaranya roda organisasi KKB. Hal ini mencakup

beberapa hal yang menjadi penghambat dalam melaksanakan setiap program maupun kegiatan yang dijalankan oleh KKB. Beberapa hal yang mengalami kendala terbagi menjadi beberapa jenis yaitu terkait dengan masalah pendanaan, masalah pegawai, dan masalah kegiatan..

Sumber pendanaan KKB mengalami masalah yang sangat berarti dan berimbas pada pelaksanaan kegiatan. Pendanaan yang berubah seiring dengan perubahan bentuk kantor dari BKKBN menjadi KKB mengakibatkan banyak kegiatan KB yang terancam tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena dana yang di alokasikan sangat minim. Dana dari pemerintah daerah melalui APBD tidak dapat mengakomodir semua kegiatan yang direncanakan oleh KKB.

Berikut menurut penuturan ibu Niken selaku KTU KKB :

“ semenjak menjadi KKB memang pendanaan menjadi kendala bagi kami untuk merancang program dan kegiatan. Karena dana yang saat ini kita terima dari APBD tidak bisa mengcover semua kegiatan yang kita rencanakan. Sementara dana bantuan dari pemerintah pusat semakin dikurangi dan tidak mencukupi untuk menutup kekurangan dan dari APBD.”

Lain halnya dengan ibu Niken, Bpk Rafael menjelaskan mengenai kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KKB terkait dengan pelaksanaan kegiatan di tingkat bawah(kecamatan dan desa).

Berikut menurut keterangan bapak rafael :

“ kita mengalami kesulitan dalam hal pelaksanaan kegiatan ditingkat bawah mas, dalam hal ini di kecamatan-kecamatan. Hal ini dikarenakan petugas PLKB yang dahulu kita punya sekarang tidak ada jumlahnya saat ini hanya satu di masing-masing kecamatan. Dahulu kita punya petugas plkb yang dapat kita perintah langsung tetapi sekarang karena bentuk organisasi kita berubah dari BKKBN menjadi KKB maka seluruh petugas PLKB di kecamatan dan desa statusnya pindah menginduk pada pegawai Dinas kesehatan. Perubahan status ini membawa dampak bagi kita. Ketika kita mau menggerakkan petugas

PLKB di kecamatan sekarang harus mendapat persetujuan dahulu kepada Kepala Dinas Kesehatan.”

Demikian juga dengan pendapat ibu kepala dinas KB yang menyatakan bahwa :

“ memang kita saat ini kehilangan petugas lapangan yang berada di kecamatan dan desa. Dahulu masing masing desa ada petugas penyuluh lapangan yang bertugas menjalankan operasional kegiatan minimal satu orang. Sekarang karena berubah maka petugas2 tersebut kepegawaiannya diambil alih oleh dinas kesehatan dan jumlahnya semakin lama semakin dikurangi. Sekarang hanya ada satu petugas di masing-masing kecamatan saja. Itupun mereka statusnya pegawai PLKB yang dimiliki oleh dinas kesehatan. Jadi ketika kita mau meminta bantuan kepada mereka kita harus mendapat persetujuan dari dinas kesehatan.

Dari beberapapernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perubahan organisasi BKKBN menjadi KKB mengalami kendala yang cukup berarti dalam melaksanakan kegiatan/program yang di canangkan. Kendala ini merupakan hasil dari perubahan organisasi KB di kabupaten Klaten, yang apabila tidak ditangani dan mendapat perhatian penuh dari pemerintah Kabupaten maka akan membawa dampak yang akan menghambat kinerja KKB.

Matrik Perubahan Organisasi BKKBN menjadi KKB di Kabupaten Klaten.

Dimensi Dampak	Sebelum Perubahan (BKKBN)
1	2
Keorganisasian	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk organisasi BKKBN; kewenangan terhadap urusan pemerintah pusat; - Secara vertikal (merupakan wakil pusat di daerah)
Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendanaan berasal dari APBN sebagai sumber pendanaan utama dan dana APBD; - Dana dari pusat besar dan bisa mencakup pendanaan semua kegiatan
Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - Sejumlah 238 orang tenaga operasional dan tenaga teknis yang tersebar di kecamatan dan di desa; - Dulu mudah menggerakkan PLKB di kecamatan ; - Mudah ketika kita mau menjalankan suatu kegiatan karena dapat
Program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Seputar program keluarga berencana; misal sosialisasi alat KB dan pendidikan KB.
Strategi Pelaksanaan Kegiatan/program	<ul style="list-style-type: none"> - Menggerakkan petugas PLKB yang ada di lapangan, baik di kecamatan dan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Amin Ibrahim. 2008. *Pokok-pokok Administrasi publik dan Implementasinya*. Bandung : PT Refika Aditama
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Gramedia
- H.B.Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press

- M. Irfan Islamy. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Moh. Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Lexy J Moeleong. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rosda Karya.
- Jusuf Udaya. 2004. *Organisasi dan pemerintahan daerah*. Jakarta: PT. Rajawali
- Riant Nugroho Dwijiwijoto. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT Gramedia
- Samodra Wibawa. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Solichin Abdul Wahab. 2005. *Analisis Kebijakanaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Bandung : Rajawali
- Tim Penulis Modul UT.2003. *Pengembangan Organisasi*. Karanganyar: UT Press
- _____.2009. *Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Kabupaten Klaten*. Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Tahun 2009.
- _____. 2008. *Indikator Kinerja dan Variabel Analisis Pencapaian Grand Strategy*. Jakarta : BKKBN
- _____.2009. *Analisa dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program KB Nasional Kabupaten Klaten*. Klaten : Kantor Pemberdayaan Perempuan.

Jurnal :

- Torben Beck Jørgensen. **Comparative and International Administrative : Public Organization, Multiple Constituencies and Governance**. *Public Administration Vol. 76 Autumn 1998 (499–518) Ó Blackwell Publishers Ltd. 1998, 108 Cowley Road, Oxford OX4 1JF, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA.*
- Jørgen Grønnegård Christensen & Thomas Pallesen. **Institutions, distributional concerns, and public sector reform**. *European Journal of Political Research 39: 179–202, 2001. © 2001 Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands*

Sumber Lain

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/ Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 70/HK-010/B5/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Pelaksanaan PP. Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana.

www.bps.go.id

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perubahan bentuk organisasi KB di Kabupaten Klatendari bentuk BKKBN menjadi bentuk KKB memberi perubahan pada internal organisasi. Perubahan-perubahan tersebut adalah :

1. Keorganisasian.

Perubahan pada segi keorganisasian KKB dapat dilihat dari perubahan struktur dan perubahan tugas pokok dan fungsi. Perubahan yang terjadi mengakibatkan struktur organisasi BKKBN yang lama menjadi lebih ramping dan sederhana pada bentuk KKB yang baru. Perampingan dan penggabungan beberapa bagian dan sub bagian menjadi seksi-seksi merupakan upaya KKB dalam merestrukturisasi organisasi agar lebih optimal dalam menjalankan tugas.

2. Sumber Pendanaan

Perubahan KKB memberikan dampak pada struktur pendanaan KKB. Perubahan ini tampak jelas dengan adanya pengurangan jatah/ porsi anggaran dan yang diterima oleh KKB yang semula lebih banyak didanai oleh APBN, sedangkan setelah berubah pendanaan lebih banyak didanai oleh APBD sedangkan dari APBN semakin dikurangi. Pada akhirnya hal ini menyebabkan adanya kekurangan anggaran karena APBD tidak mencukupi untuk mencover program/kegiatan yang dilaksanakan oleh KKB.

3. Kepegawaian

Dimensi kepegawaian KKB juga mengalami perubahan yang mana setelah berubah KKB hanya memiliki karyawan sebanyak 28 orang, padahal dahulu ada sekitar 238 pegawai. Hal ini mengakibatkan kinerja KKB menjadi terhambat karena personilnya kurang mencukupi. Pegawai KKB banyak yang ditarik ke dinas kesehatan sehingga ketika membutuhkan bantuan mereka, KKB harus mendapat persetujuan dahulu dari dinas kesehatan.

4. Program/ Kegiatan

Program/kegiatan yang dilakukan oleh kantor KKB juga mengalami perubahan meskipun tidak signifikan. Ada penambahan program seperti misalnya program pemberdayaan perempuan yang dahulu masih ditangani oleh dinas kesos.

B. Saran

Dalam usahanya untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari perubahan organisasi KKB maka peneliti menyarankan :

1. Restrukturisasi dan reposisi pegawai yang dikaji dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang sudah melekat pada pegawai yang terdahulu yaitu pengalaman yang telah dimiliki oleh masing-masing staff terdahulu. Hal ini diperuntukkan agar kinerja kantor KB tidak terpengaruh oleh adanya perubahan struktur yang baru. Serta tidak mengeluarkan biaya pelatihan untuk melatih pegawai baru selama dalam proses perubahan.
2. Melakukan penataan ulang program dan penyesuaian dengan alokasi dana yang dimiliki oleh kantor KKB.

3. Memperhatikan dana yang diposkan untuk kegiatan kantor KKB, dalam hal ini pendanaan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah sehingga tidak menyebabkan adanya kekurangan dana dalam setiap pelaksanaan program KB. Dalam hal ini perlu membuat kalaprioritas dalam alokasi pendanaan. Program-program yang sudah berjalan baik perlu mendapat perhatian utama agar tetap berkesinambungan.
4. Kegiatan/ program yang sudah dicanangkan oleh KKB harus mendapat perhatian penuh meskipun sedang terjadi perubahan. Perlu adanya penyusunan konsep baru dalam pelaksanaan program agar program tetap berjalan lancar. Tanggap terhadap adanya program-program baru yang menjadi tanggung jawab KKB.



